



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

**RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
TAHUN 2024**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO**

**Jalan Raden Wijaya Nomor 60 Telepon (0321) 321958
M O J O K E R T O**



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan R. Wijaya Nomor 60 Mojokerto, Jawa Timur
Telp. (0321) 321958 Fax. (0321) 321958

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188/1181/KEP/416-103/2023
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
13. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait ;
- c. melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan ; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 13 Januari 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO,



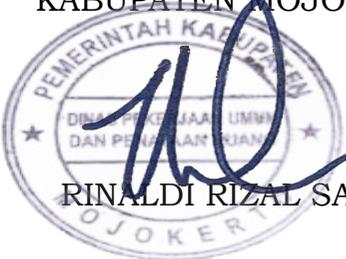
RINALDI RIZAL SABIRIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188/1181/KEP/416-103/2023
TANGGAL 13 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
MOJOKERTO TAHUN 2024**

NO.	JABATAN DALAM KEGIATAN	JABATAN DALAM SATUAN/UNIT KERJA
1.	Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto2. Sub Koordinator Penyusunan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto3. Kasubag Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto4. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto5. Staf pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO,


RINALDI RIZAL SABIRIN



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan R. Wijaya Nomor 60 Mojokerto, Jawa Timur
Telp. (0321) 321958 Fax. (0321) 321958

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45/14178/KEP/416-103/2023
TENTANG
RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026;
17. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;

19. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memuat tujuan sasaran, strategi, arah kebijakan serta rencana program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah selama periode 1 tahun, yang disusun berpedoman kepada RPJMD 2021 - 2026 dan RKPD 2024 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah .
- 3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

- KETIGA : Uraian Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum
Kedua, tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 13 Juli 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO,



RINALDI RIZAL SABIRIN

KATA PENGANTAR

Penyusunan Renja PD merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur secara rinci dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026.

Harapan kami semoga Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ini benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2024.

Sumbang saran dan koreksi dari pihak-pihak terkait sangat kami harapkan, guna penyempurnaan Renja PD ini.

Mojokerto, 13 Juli 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO



Ir. RINALDI RIZAL SABIRIN, ST., MBA.

Pembina Tk. I

NIP. 19791010 200901 1 011

DAFTAR ISI

Kata	i
Pengantar		
Daftar Isi	ii
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	5
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II.	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	56
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal dan Rancangan RKPD	60
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	106
BAB III.	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	132
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	132
	3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah .	134
	3.3. Program dan Kegiatan	136
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	159
BAB V.	PENUTUP	192

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berfungsi sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Proses Penyusunan Renja ini terdiri atas persiapan penyusunan renja, penyusunan rancangan awal renja, penyusunan rancangan renja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir renja dan penetapan renja.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan serta Hasil Review Rancangan Awal RKPD.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah menjadi dasar Penyusunan Rancangan Akhir RKPD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024 ;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto (RPJMD) Tahun 2021 – 2026;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
30. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto;
31. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai dasar Penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten Mojokerto dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan gambaran pelaksanaan renja tahun lalu perangkat daerah;
- b. Memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi perangkat daerah;
- c. Memberikan gambaran perumusan prioritas pembangunan daerah ;
- d. Memberikan gambaran perumusan rencana kerja program dan pendanaan pada tahun yang akan datang;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Rancangan Akhir Renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini terdiri atas Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisi mengenai Telaahan terhadap Kebijakan Nasional menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, Serta Rencana program dan kegiatan tahun n dan prakiraan maju $n+1$ beserta indikator, lokasi, target capaian kinerja, pagu indikatif beserta rencana sumber pendanaannya.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat program dan kegiatan yang didasarkan atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB V. Penutup

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada tahun 2022 dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD Tahun Berjalan (2023) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL T-C. 29 (2.2.1)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN MOJOKERTO

Lembar 1
 :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									

1.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase target Kinerja OPD yang terpenuhi	100	100	100	100	100,0 0	100	0	-
1.3.1.2.0 1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersusun</i>	100	100	100	100	100,0 0	100	0	-
1.3.1.2.01 .1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	6	6	100,0 0	6	0	-
1.3.1.2.01 .6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	1	100,0 0	1	0	-
1.3.1.2.01 .7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	6	6	100,0 0	6	0	-
1.3.1.2.0 2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ASN terbayar gaji dan tunjangannya</i>	100	100	100	100	100,0 0	100	0	-

1.3.1.2.02 .1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	218	218	218	218	100,0 0	218	0	-
1.3.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset OPD yang tercatat dan dilaporkan	100	100	100	100	100,0 0	100	0	-
1.3.1.2.03 .2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	100,0 0	1	0	-
1.3.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai memakai pakaian dinas lengkap dengan atributnya	100	100	100	100	100,0 0	100	0	-
1.3.1.2.05 .2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	1	1	100,0 0	1	0	-
1.3.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksana	100	100	100	100	100,0 0	100	0	-
1.3.1.2.06 .1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	1	1	100,0 0	1	0	-
1.3.1.2.06 .2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1		1	0	
1.3.1.2.06 .4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100,0 0	1	0	-

1.3.1.2.06 .5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	1	100,0 0	1	0	-
1.3.1.2.06 .6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	1	1	100,0 0	1	0	-
1.3.1.2.06 .7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	1	1	100,0 0	1	0	-
1.3.1.2.06 .9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600	600	600	600	100,0 0	600	0	-
1.3.1.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100		100	0	
1.3.1.2.07 .2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	1	1	100,0 0	0	0	-
1.3.1.2.07 .6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16	16	16	16	100,0 0	16	0	-

1.3.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100		100	0	
1.3.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100,00	12	0	-
1.3.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100,00	12	0	-
1.3.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara	100	100	100	100	100,00	100	0	-
1.3.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	20	20	20	100,00	20	0	-

1.3.1.2.09 .3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	50	50	50	50	100,0 0	50	0	-
1.3.1.2.09 .6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5	5	5	100,0 0	5	0	-
1.3.1.2.09 .9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	3	3	100,0 0	3	0	-
1.3.1.2.09 .10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	230	230	230	230	100,0 0	230	0	-
1.3.2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi (Primer, Sekunder, Tersier) dalam kondisi baik	75	75	75	44,09		44,09	0	
1.3.2.2.0 1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDA terkelola	80	80	80	100	125,0 0	100	0	-

1.3.2.2.01 .3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1	1	1	1	100,0 0	1	0	-
1.3.2.2.01 .49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	5	5	5	5	100,0 0	5	0	-
1.3.2.2.01 .62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	2	2	2	2	100,0 0	2	0	-
1.3.2.2.0 2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi yang dikelola (dipelihara/direhabilitasi) dari total jaringan irigasi kewenangan	75	75	75	43	57,33	43	0	-

1.3.2.2.02 .8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,3	0,3	0,3	0,3	100,0 0	0,3	0	-
1.3.2.2.02 .14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2,4	2,4	2,4	2,4	100,0 0	2,4	0	-
1.3.2.2.02 .21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2	2	2	2	100,0 0	2	0	-
1.3.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten	3402 22	3402 22	34022 2	31564 7	92,78	3156 47	0	-
1.3.3.2.0 1	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui kegiatan penyediaan SPAM</i>	1930	1930	1930	1180	61,14	1180	0	-

1.3.3.2.01 .1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	15	15	15	7	46,67	7	0	-
1.3.3.2.01 .6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di KawasanPerdesaan	Jumlah rumah tangga terlayani SPAM (SR)	548	548	548	454	82,85	454	0	-
1.3.3.2.01 .19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah tangga terlayani SPAM (SR)	1950	1950	1950	726	37,23	726	0	-
1.3.4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	18	18	18	6,58	36,56	6,58	0	-
1.3.4.2.01	<i>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah desa yang disediakan TPS/TPST/TPS3R</i>	6	6	6	6	100,00	6	0	-
1.3.4.2.01 .3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1600	1600	1600	1586	99,13	1586	0	-
1.3.4.2.01 .7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan	40	40	40	40	100,00	40	0	-

1.3.5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	2839 55	2839 55	28395 5	31879 8	112,2 7	3187 98	0	-
1.3.5.2.0 1	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar</i>	32	32	32	0	0,00	0	0	-
1.3.5.2.01 .1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1	1	1	1	100,0 0	1	0	-
1.3.5.2.01 .6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	200	200	200	280	140,0 0	280	0	-
1.3.6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	18	18	18	11,39	63,28	11,39	0	-

1.3.6.2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	2543	2543	2543	369,6	14,53	369,6	0	-
1.3.6.2.01 .5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	1700	1700	1700	0	0,00	0	0	-
1.3.6.2.01 .12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	603	603	603	267,6	44,38	267,6	0	-
1.3.6.2.01 .13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	240	240	240	102	42,50	102	0	-
1.3.8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan gedung instansi pemerintah yang laik fungsi	90	90	90	92,45	102,7 2	92,45	0	-

1.3.8.2.0 1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung instansi pemerintah kondisi baik	90	90	90	92,45	102,7 2	92,45	0	-
1.3.8.2.01 .1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1	1	1	1	100,0 0	1	0	-
1.3.8.2.01 .2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	10	10	10	12	120,0 0	12	0	-
1.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	60,98	60,98	60,98	77,24	126,6 6	77,24	0	-

1.3.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik	635	635	635	804,378	126,67	804,378	0	-
1.3.10.2.01.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	7	7	7	7	100,00	7	0	-
1.3.10.2.01.6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	25,25	25,25	25,25	24,582	97,35	24,582	0	-
1.3.10.2.01.8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	6,48	6,48	6,48	8,211	126,71	8,211	0	-
1.3.10.2.01.9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,24	0,24	0,24	0,019	7,92	0,019	0	-
1.3.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	8,84	8,84	8,84	19,358	218,98	19,358	0	-
1.3.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	10	10	10	27,5	275,00	27,5	0	-

1.3.10.2.0 1.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	22	22	22	16	72,73	16	0	-
1.3.10.2.0 1.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	70	70	70	339	484,29	339	0	-
1.3.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-	-	-	-	0,00	-	0	-
1.3.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih	50	50	50	40	80,00	40	0	-
1.3.11.2.0 1.6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	50	50	50	40	80,00	40	0	-
1.3.11.2.0 1.7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	360	360	360	360	100,00	360	0	-
1.3.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	100	100	100	100	100,00	100	0	-

1.3.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen tata ruang yang tersusun	38,89	38,89	38,89	38,89	100,00	38,89	0	-
1.3.12.2.01.2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	3	3	3	3	100,00	3	0	-
1.3.12.2.01.3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1	1	1	1	100,00	1	0	-
1.3.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permintaan informasi tata ruang yang tertangani	100	100	100	100	100,00	100	0	-
1.3.12.2.03.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1	1	1	1	100,00	1	0	-
1.3.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan ruang daerah sesuai rencana tata ruang	100	100	100	100	100,00	100	0	-

1.3.12.2.0 4.4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	1	1	1	100,0 0	1	0	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada pencapaian indikator-indikator kinerja yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Adapun indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL T-C. 30 (2.2.2)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik			72,38%	72,88%	72,88%	73,38%	74,99%		75,49%	75,99%	
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi		IKK	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	SPM	IKK	86,87%	87,52%	88,82%	89,15%	88,95%		89,95%	90,45%	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	SPM	IKK	87,85%	88,12%	88,89%	89,34%	94,80%		95,80%	96,30%	
5	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai			100,00%	100,00%	100%	100%	58,33%		59,33%	59,83%	

6	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah			80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	84,65%		85,65%	86,15%	
7	Indeks profesionalitas ASN			80	80	80	80	42		52	62	
8	Nilai Sakip Perangkat Daerah			A	A	A	A	A		A	A	
9	Nilai LPPD Perangkat Daerah			3	3	3	3	3		3	3	
10	Nilai RB Perangkat Daerah			B	B	B	B	BB		BB	BB	
11	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan			1	1	1	1	1		1	1	
12	Rasio kepatuhan IMB		IKK	10,00%	11,00%	12,00%	13,00%	10,00%		11,00%	12,00%	
13	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten		IKK	81,20%	82,20%	83,20%	84,20%	88,24%		89,24%	89,74%	
14	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		IKK	19,08%	24,81%	30,53%	36,26%	18,73%		19,73%	20,23%	

15	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	
16	Persentase panjang jaringan irigasi (Primer, Sekunder, Tersier) dalam kondisi baik			77,00%	78,00%	79,00%	80,00%	44,09%		45,09%	45,59%	
17	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten			340.222 KK	342.152 KK	344.092 KK	346.012 KK	315.647 KK		315.647 KK	315.647 KK	
18	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R			18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	6,58%		7,58%	8,08%	
19	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T			283.955 Rumah	283.955 Rumah	283.955 Rumah	283.955 Rumah	318.798 Rumah		318.798 Rumah	318.798 Rumah	
20	Persentase Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai			18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	11,39%		12,39%	12,89%	

21	Rasio bangunan gedung instansi pemerintah yang laik fungsi			90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	92,45%		93,45%	93,95%	
22	Persentase bangunan gedung sesuai RTBL			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	9,96%		10,96%	11,46%	
23	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik			60,98%	60,98%	60,98%	60,98%	77,24%		78,24%	78,74%	

A. RENCANA STRATEGIS

Renstra Perangkat Daerah dibuat dengan mengakomodir visi dan misi kepala daerah terpilih. Visi Kepala Daerah terpilih untuk periode 2021 – 2026 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, yaitu **” Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”** dan Misi Kabupaten Mojokerto yaitu :

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan.
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Misi yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto adalah **Misi 4** yaitu **” Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan”**

Dalam menentukan perencanaan kinerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto mengacu rencana strategis dan berdasar pada tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan. Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto yakni :

TUJUAN :

1. Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung;

Dengan indikator : Persentase Infrastruktur Kondisi Baik

SASARAN :

1. Untuk mencapai tujuan ” Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung ”, maka ditetapkan sasaran :

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan;

Dengan indikator :

1. Nilai SAKIP PD (Non IKU);

- 2. NILAI RB PD (Non IKU);
- 3. NILAI LPPD PD (Non IKU);
- b. Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air;
Dengan indikator :
 - 4. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (IKU);
- c. Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi;
Dengan indikator :
 - 5. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten (IKU);
- d. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
Dengan indikator :
 - 6. Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R (Non IKU);
- e. Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik.
Dengan indikator :
 - 7. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKU);
- f. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
Dengan indikator :
 - 8. Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase (Non IKU);
- g. Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung;
Dengan indikator :
 - 9. Rasio kepatuhan IMB (IKU);
- h. Meningkatnya kemantapan jalan;
Dengan indikator :
 - 10. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (IKU);
- i. Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi;
Dengan indikator :

11. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (IKU);

- j. Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang.

Dengan indikator :

12. Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang (IKU);

B. STRATEGI

Untuk mencapai sasaran dalam rencana strategis Dinas Pekerjaan Ruang Kabupaten Mojokerto diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat dijabarkan dalam suatu kebijakan sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	: Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		
MISI IV	: Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja	Pembentukan Tim SAKIP Perangkat Daerah
		Peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi	Pembentukan Tim RB Perangkat Daerah

		Peningkatan kinerja ASN yang berintegritas dan berkapasitas tinggi	Pembentukan Tim LPPD Perangkat Daerah
		Pengembangan sistem pengawasan yang efektif	
		Penataan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah berdasar standar akuntansi pemerintah	
	Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Peningkatan peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP 3A
		Meningkatkan kualitas Infrastruktur Irigasi	Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi yang sudah ada melalui kegiatan rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan
		Mempertahankan ketersediaan air irigasi terutama pada saat musim kemarau	Peningkatan Kualitas bangunan penampung air Embung/Bendung/Waduk yang sudah ada melalui kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi
	Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Mengintensifkan koordinasi dengan institusi dan OPD lain yang terkait dengan	Penguatan Pokja Air Minum Lintas Institusi tingkat kabupaten

		penyediaan air minum	
		Meningkatkan penyediaan infrastruktur air minum pada daerah rawan air	Pembangunan infrastruktur penyediaan air minum pada daerah rawan air
	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Pendataan desa yang belum memiliki sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah pada desa yang belum terlayani
		Mengintensifkan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup selaku OPD yang menangani pengeolaan sampah	Pembentukan Pokja pengelolaan sampah tingkat kabupaten
	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Meningkatkan sarana dan akses pengolahan air limbah rumah tangga melalui penerapan teknologi on-site (setempat) dan off-site (terpusat).	Pembangunan sarana pengolahan air limbah domestik
		Meningkatkan proporsi pembiayaan komponen air limbah domestik yang bersumber dari pemerintah daerah.	Pengaktifan Kembali IPLT

			Penyusunan aturan terkait pengolahan air limbah
			Penguatan pendampingan proses perencanaan dan penganggaran
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Mengoptimalkan fungsi sistem drainase perkotaan dan lingkungan yang sudah ada secara terpadu	Pengoptimalan fungsi sistem drainase perkotaan dan lingkungan yang sudah ada
		Meningkatkan pembangunan jaringan drainase yang terintegrasi	Pembangunan jaringan drainase yang terhubung dengan sungai
	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Penguatan pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung	Penguatan implementasi Perda BG
			Penguatan implementasi Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung
			Mendorong percepatan pelaksanaan SLF
	Meningkatnya kemantapan jalan	Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan serta prasarana pelengkapannya	Peningkatan kualitas struktur jalan/jembatan
			Pelebaran Ruas Jalan dan Jembatan

			Peningkatan Kelas Jalan
			Peningkatan kualitas bahan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan
	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Meningkatkan kuantitas tenaga operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
	Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	Meningkatkan kualitas informasi dan ketersediaan dokumen rencana tata ruang	Mendorong percepatan Pengesahan 6 Perda RDTRK yang sudah selesai penyusunannya
Pembangunan Infrastruktur Strategis	Pembangunan Gedung perkantoran Ibukota Kabupaten & GOR bertaraf internasional	Memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam penganggaran pembangunan infrastruktur strategis	Mendorong penyusunan aturan daerah terkait Proyek Strategis Daerah beserta tahapan pembangunannya
		Menyusun tahapan pembangunan infrastruktur strategis	

C. PROGRAM/KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah guna mencapai sasaran yang ditetapkan. Program-program yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 terinci sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan – kegiatan dari program ini yaitu :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Kegiatan – kegiatan dari program ini yaitu :
 - a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Kegiatan dari program ini yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
Kegiatan dari program ini yaitu Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota.
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Kegiatan dari program ini yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Kegiatan dari program ini yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota;

7. Program Penataan Bangunan Gedung

Kegiatan dari program ini yaitu Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;

8. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Kegiatan pada program ini sebanyak 4 Kegiatan berupa Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), Fasilitasi dan Koordinasi Penataan Ruang, Penyusunan dan Validasi KLHS RDTR BWP Mojoanyar dan Persetujuan Substansi Raperda RDTR BWP Mojoanyar

9. Program Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan pada program ini yaitu Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Kegiatan pada program ini yaitu Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.

11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kegiatan pada program ini yaitu :

- a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota;
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

12. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kegiatan untuk PAD diperoleh dari hasil retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa sewa alat berat, sewa alat laboratorium dan hasil penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan berupa penjualan hasil penebangan pohon.

D. PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2018 Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan perjanjian kinerja dilakukan setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dengan jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud atas tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga menyangkut outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto memiliki 17 (Tujuh Belas) Sasaran Strategis berdasar pada dokumen perencanaan perangkat daerah dan mengacu kepada dokumen perencanaan pemerintah daerah yang tertuang dalam lembar perjanjian kinerja tahun 2022. Adapun sasaran strategis yang dimaksud yaitu (1) Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung, (2) Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air, (3) Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi, (4) Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestic, (5) Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel, (6) Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah, (7) Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung, (8) Meningkatnya kemantapan jalan, (9) Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi, (10) Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang, (11) Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), (12) Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, (13) Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan

Persampahan Regional, (14) Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, (15) Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, (16) Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya, (17) Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan.

Tabel Lampiran Perjanjian Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto

Tahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	-2	(3)	(4)
1	Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	72,38%
2	Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100,00%
3	Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	86,87%
4	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	87,85%
5	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	100,00%
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	80,00%

		Indeks profesionalitas ASN	80
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	A
		Nilai LPPD Perangkat Daerah	3
		Nilai RB Perangkat Daerah	B
6	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1
7	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB	10,00%
8	Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	81,20%
9	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	19,08%
10	Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	100,00%
11	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi (Primer, Sekunder, Tersier) dalam kondisi baik	77,00%
12	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten	340.222 KK

13	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	18,00%
14	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	283.955 Rumah
15	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	18,00%
16	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	1. Rasio bangunan gedung instansi pemerintah yang laik fungsi	90,00%
		2. Persentase bangunan gedung sesuai RTBL	10,00%
17	Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	60,98%

No	Program	Anggaran		Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	27.011.694.344,00	PAPBD
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp.	9.618.550.200,00	PAPBD
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.	5.954.232.700,00	PAPBD
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp.	2.929.836.500,00	APBD

5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp.	2.664.947.500,00	APBD
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp.	6.459.392.650,00	PAPBD
7	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.	9.519.000.000,00	PAPBD
8	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp.	167.021.029.772,00	PAPBD
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp.	525.000.000,00	PAPBD
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.	2.225.000.000,00	PAPBD

E. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasi dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok : masukan (input), proses (process), keluaran (output) dan hasil (outcomes). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk : kegiatan, rupiah, lokasi dan sebagainya.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja adalah :

- a. Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air minum dan bangunan gedung.

Sasaran ini merupakan tujuan yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 dan dituangkan dalam dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto. Adapun indikator dari sasaran ini yaitu “ Persentase Infrastruktur Kondisi Baik ” dengan target sebesar 72,38 % dapat tercapai sebesar 74,99 % dari hasil perbandingan target dan realisasi terdapat hasil kinerja sebesar 103,60 %, formulasi perhitungan untuk mengukur indikator ini adalah :

$\frac{\text{Persentase kondisi baik 6 Komponen Penilaian (Jalan, Jembatan, Irigasi, Sanitasi, Air Minum \& Bangunan Gedung)}}{6} \times 100$

Komponen :

- Jalan

Total Panjang Jalan Kabupaten Mojokerto 1.041,324 km sesuai dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/284/416-012/2018 tentang Status Ruas Jalan Kabupaten Mojokerto, sampai dengan akhir tahun 2022 jalan kondisi baik sepanjang 829, 614 km (79,67 %).

- Jembatan

Jumlah keseluruhan Jembatan Kabupaten Mojokerto 607 unit sesuai dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/284/416-012/2018 tentang Status Ruas Jalan Kabupaten Mojokerto, sampai dengan akhir tahun 2022 jembatan kondisi baik sebanyak 339 unit (55,85 %).

- Irigasi

Jumlah DI/JI Kabupaten Mojokerto 365 DI/JI seluas 17.767 Ha sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Total Panjang Saluran irigasi (Saluran Primer, Sekunder, Tersier) sepanjang 1.273.883 meter, sampai dengan akhir tahun 2022 Saluran irigasi kondisi baik 539.223 meter (42,33 %).

- Sanitasi

Sanitasi dapat dipahami sebagai usaha pembuangan dan atau pengelolaan tinja, endapan air limbah (sullage) dan limbah padat dengan cara memperhatikan kesehatan untuk membuat lingkungan hidup di rumah dan lingkungan menjadi bersih dan sehat. Jumlah rumah sampai dengan akhir tahun 2022 sebanyak 336.285 rumah, jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk 318.015 rumah dan jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di ipald 783 rumah. Total jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic 318.798 rumah (94,80%).

- Air Minum

Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum. Jumlah proyeksi rumah tangga di kabupaten mojokerto tahun 2022 sebesar 354.842 rumah tangga, Kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan sebesar 78.009 rumah tangga dan bukan jaringan perpipaan sebesar 237.639 rumah tangga. Total

Kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten Mojokerto sebesar 315.647 rumah tangga (88,95%).

- Bangunan Gedung

Bangunan gedung yang dimaksud dalam indikator ini adalah bangunan gedung instansi pemerintah. Ketersediaan data jumlah bangunan gedung di kabupaten Mojokerto masih perlu dilakukan pendataan terhadap kondisi baiknya. Pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pendataan gedung instansi pemerintah di kecamatan Mojokerto, dari hasil pendataan didapati 108 gedung instansi pemerintah. Dari 108 gedung yang ada terdata sebanyak 98 (90,74%) gedung instansi pemerintah yang berkondisi baik dan 10 gedung instansi pemerintah yang berkondisi antara sedang, sebagian rusak, rusak dan buruk.

b. Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air.

Keberadaan infrastruktur sumber daya air akan mengatasi masalah variasi musim dan ketimpangan ketersediaan air dengan memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi serta mewujudkan ketahanan air di kabupaten Mojokerto. Pengelolaan infrastruktur sumber daya air memberikan manfaat-manfaat di berbagai sektor yang kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur sumber daya air antara lain adalah penyedia air baku atau air minum, irigasi, pembangkit listrik, dan pengendali banjir namun dalam sasaran ini dibatasi pada irigasi. Adapun indikator dari sasaran ini yaitu “ Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi ” dengan

target sebesar 100 % dapat tercapai sebesar 100 % dari hasil perbandingan target dan realisasi terdapat hasil kinerja sebesar 100 %, formulasi perhitungan untuk mengukur indikator ini adalah :

Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara (ha)

Luas daerah irigasi kewenangan kab kota

Jumlah Daerah Irigasi kabupaten mojokerto berdasar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi yaitu 365 Daerah Irigasi (DI) dengan luas 17.757 Ha. Keseluruhan Daerah Irigasi dilayani oleh jaringan irigasi, 358 DI seluas 17.145 Ha dioperasikan dan dipelihara, 6 DI seluas 468 Ha direhabilitasi dan 1 DI seluas 144 Ha ditingkatkan.

- c. Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat Kesehatan dan dapat langsung diminum. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. Dalam kebijakannya, Pemerintah Indonesia telah menetapkan target akses universal (100%) sektor air minum tercapai pada tahun 2024. Khusus untuk target akses air minum, Pemerintah menggunakan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) sebagai strategi untuk menjamin ketersediaan dan terpenuhinya pelayanan air minum bagi masyarakat yang memenuhi 4 standar kriteria atau yang dikenal dengan 4K. Standar kriteria 4K mencakup;

(1) Kuantitas, mencakup standar kebutuhan air minum 60 liter/orang/hari; (2) Kualitas, sesuai dengan standar kesehatan Permenkes No. 492 tahun 2010; (3) Kontinuitas, mencukupi kebutuhan air minimal selama 24 jam; (4) Keterjangkauan, mudah diakses dengan biaya yang terjangkau. Adapun indikator dari sasaran ini yaitu “ Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten ” dengan target sebesar 86,87 % dapat tercapai sebesar 88,95 % dari hasil perbandingan target dan realisasi terdapat hasil kinerja sebesar 102,40 %, formulasi perhitungan untuk mengukur indikator ini adalah :

Jumlah kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	x 100%
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/>	
Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut	

Jumlah kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi sebanyak 315.647 rumah tangga (88,95 %) sedangkan Jumlah total proyeksi rumah tangga kabupaten mojokerto sampai dengan tahun 2022 sebesar 354.842 rumah tangga.

- d. Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestic.

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah rangkaian layanan pengolahan air limbah domestik yang

diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan. Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Akses dasar air limbah domestik adalah fasilitas buang air besar (BAB) individual yang terkoneksi ke bangunan pengolahan setempat yang berupa cubluk. Indikator dari sasaran ini yaitu “ Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik ” dengan target sebesar 87,85 % dapat tercapai sebesar 94,80 % dari hasil perbandingan target dan realisasi terdapat hasil kinerja sebesar 107,91 %, formulasi perhitungan untuk mengukur indikator ini adalah :

Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	$\times 100\%$
<hr style="width: 60%; margin-left: 0;"/> Jumlah rumah di Kabupaten Kota	

Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk sebanyak 318.015 rumah, sampai dengan tahun 2022 rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT belum ada karena kabupaten Mojokerto tidak memiliki IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) dan Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD sebanyak 783 rumah. Jumlah rumah di Kabupaten Mojokerto sebanyak 336.285 rumah.

- e. Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Terminologi good governance memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari good governance. Namun demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa good governance telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional (national prosperity).

Dengan cara meningkatkan akuntabilitas, reliabilitas (kehandalan), dan pengambilan kebijakan, yang diperkirakan di dalam organisasi pemerintah. Adapun indikator dari sasaran ini yaitu “ (1) Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai; (2) Persentase realisasi anggaran perangkat daerah; (3) Indeks profesionalitas ASN; (4) Nilai SAKIP Perangkat Daerah; (5) Nilai LPPD Perangkat Daerah; (6) Nilai RB Perangkat Daerah “.

1. Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai;

Target untuk indikator ini sebesar 100 % dengan realisasi sebesar 58,33 %, hasil kinerja sebesar 58,33 %. Tahun 2022 terdapat 12 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Mojokerto, sebanyak 7 Program dapat tercapai targetnya dan 5 Program belum tercapai.

2. Persentase realisasi anggaran perangkat daerah;

Target untuk indikator ini sebesar 80 % dengan realisasi sebesar 84,65 %, hasil kinerja sebesar 105,55%. Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto mendapat anggaran sesuai DPA sebesar Rp. 233.928.683.666 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 198.013.482.489.

3. Indeks profesionalitas ASN;

Target untuk indikator ini sebesar 80 dengan realisasi sebesar 41,71., hasil kinerja sebesar 52,14 %. Nilai 41,71 merupakan nilai tahun 2021 karena nilai tahun 2022 masih belum keluar.

4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;

Target untuk indikator ini A dan realisasi A, hasil kinerja sebesar 100 %.

5. Nilai LPPD Perangkat Daerah;

Target untuk indikator ini 3 dan realisasi 3, hasil kinerja sebesar 100 %.

6. Nilai RB Perangkat Daerah

Target untuk indikator ini B dan realisasi B, hasil kinerja sebesar 116,67 %.

f. Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah.

Inovasi ialah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun proses produksinya. Adapun indikator dari sasaran ini yaitu “ Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan “, dengan target sebesar 1 dapat tercapai sebesar 1 dari hasil perbandingan target dan realisasi terdapat hasil kinerja sebesar 100 %. Inovasi yang dihasilkan pada tahun 2022 adalah SIRUANG

(Sistem Informasi Tata Ruang) yang digunakan untuk melakukan permohonan perijinan ITR, SKRK dan KKPR.

g. Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan gedung, bahwa bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertib diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung. Dalam hal ini, salah satu persyaratan administratif bangunan gedung adalah izin mendirikan bangunan gedung yang pada akhir tahun 2021 kemarin berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung. Indikator dari sasaran ini yaitu “ Rasio kepatuhan IMB ” dengan target sebesar 10 % dapat tercapai sebesar 10 % dari hasil perbandingan target dan realisasi terdapat hasil kinerja sebesar 100%, formulasi perhitungan untuk mengukur indikator ini adalah :

$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan PBG yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah PBG yang berlaku}} \times 100 \%$
--

Jumlah pemanfaatan PBG yang sesuai peruntukannya sebanyak 52 PBG sedangkan jumlah PBG yang berlaku sampai dengan akhir tahun 2022

sebanyak 52. Jumlah IMB mulai dari 2014 – 2021 sebanyak 3200 IMB.

h. Meningkatnya kemantapan jalan.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan Mantap adalah jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang, sementara jalan yang di katakan Tidak Mantap adalah jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Indikator dari sasaran ini yaitu “ Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten ” dengan target sebesar 81,20 % dapat tercapai sebesar 88,24 % dari hasil perbandingan target dan realisasi terdapat hasil kinerja sebesar 108,67 %, formulasi perhitungan untuk mengukur indikator ini adalah :

Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap <hr/> Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota

Berdasar Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/284/HK/416-102/2018 tentang Status Ruas Jalan Kabupaten Mojokerto, Ruas Jalan Kabupaten Mojokerto sebanyak 342 dengan panjang total 1.041,324 km. Sampai dengan akhir tahun 2022 Jalan kondisi baik sepanjang 804,378 km (77,24 %) dan kondisi sedang sepanjang 114,520 km (11,00 %). Total Panjang Jalan Kabupaten dengan kondisi mantap adalah 937,898 km (88,24 %).

- i. Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi.

UU 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mendefinisikan bahwa Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi Konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi adalah upaya pengelolaan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan Bangunan Konstruksi yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, berkualitas dan berkelanjutan. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Pasal 4 PP 22/2020 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan tanggung jawabnya dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi. Adapun penyelenggaraan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang mengikutsertakan Masyarakat jasa konstruksi meliputi :

(1) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; (2) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi Meliputi Daerah Kabupaten/kota; (3) Penerbitan Izin Usaha Nasional Kualifikasi Kecil, Menengah Dan Besar; (4) Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertip pengawasan jasa konstruksi. Indikator dari sasaran ini yaitu “ Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi ” dengan target sebesar 19,08 % dapat tercapai sebesar 18,73 % dari hasil perbandingan target dan realisasi terdapat hasil kinerja sebesar 98,17 %, formulasi perhitungan untuk mengukur indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Kebutuhan Tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di kabupaten Mojokerto sampai dengan akhir tahun 2022 dari 148 Badan Usaha sebanyak 331 Orang, sementara Jumlah Tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi sebanyak 62 Orang.

- j. Mempertahankan kesesuaian pembangunan /peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang.

Kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang adalah kesesuaian kegiatan pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dalam dokumen pelaksanaan anggaran dengan indikasi program dalam rencana tata ruang. Indikator dari sasaran ini yaitu “ Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang ” dengan target sebesar 100 % dapat tercapai sebesar 100 % dari hasil perbandingan target dan realisasi terdapat hasil kinerja sebesar 100 %, formulasi perhitungan untuk mengukur indikator ini adalah:

Jumlah kegiatan pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dalam DPA	x 100%
Jumlah Indikasi Program dalam dokumen rencana tata ruang	

Indikasi program adalah arahan pemanfaatan ruang dalam perwujudan rencana struktur dan pola ruang selama dua puluh tahun masa perencanaan. Indikasi program RTRW harus selaras dengan program dalam

rencana pembangunan dari segi nomenklatur, lokasi, waktu dan fungsi.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentu memiliki permasalahan dan hambatan setiap tahunnya. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang sumber daya air
 - a. Jumlah tenaga dan Sumber Daya Manusia yang terbatas di tingkat wilayah sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pelaporan kegiatan, yang pada akhirnya menyulitkan penentuan prioritas/ perencanaan Program dan Kegiatan. Hal ini dikarenakan kondisi eksisting Jaringan Irigasi belum mampu teridentifikasi dengan baik;
 - b. Belum Optimalnya sarana prasarana pendukung dalam Kinerja Pelayanan Sumber daya air yang mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan pelayanan kinerja pada masyarakat;
 - c. Ketersediaan air baku terus berkurang sementara kebutuhan air baku bertambah tiap tahunnya;
 - d. Menurunnya Usia guna waduk-waduk besar/embung dan tempat penampung air lainnya yang lebih cepat dari rencana karena kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan yang menyebabkan sedimentasi;
 - e. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi sumber daya air yang terpadu;
 - f. Tingkat kesadaran masyarakat petani pada efisiensi pemakaian air yang dapat menimbulkan konflik pemakaian air;
 - g. Laju penurunan kinerja jaringan irigasi dan tampungan air lebih cepat dibandingkan perbaikannya, dikarenakan Usia guna bangunan yang relatif pendek dan akibat daya rusak air;
 - h. Kesadaran masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana masih kurang;

- i. Perubahan Iklim dan kerusakan lingkungan menyebabkan banjir dan kekeringan sehingga berdampak pada penurunan dasar sungai dan pendangkalan pada hilir.
 - j. Konflik horizontal terhadap warga pemakai air irigasi.
2. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan
- a. Laju peningkatan kerusakan pada jalan dan jembatan yang disebabkan oleh volume lalu lintas yang tinggi dan rendahnya kesadaran pengguna jalan khususnya kendaraan angkut (Tonase kendaraan yang melebihi kapasitas jalan dan jembatan);
 - b. Konflik horizontal terhadap warga sekitar lokasi pekerjaan.
 - c. Masih adanya kondisi jalan yang belum standar sepanjang 206 km;
 - d. Terdapat kondisi jembatan yang rusak sebanyak 56 jembatan;
 - e. Terdapat 274 jembatan yang lebarnya belum sesuai dengan lebar jalan;
 - f. Tingginya kebutuhan penahan jalan dan drainase, untuk drainase sepanjang 170 km dan penahan jalan sepanjang 300 km;
 - g. Terjadinya penurunan kualitas jalan dengan tingkat kerusakan sebesar 10 % sepanjang 150 km;
3. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang keciptakaryaan, bina konstruksi dan penataan ruang
- a. Belum adanya sosialisasi yang masiv terhadap konsep IPAL komunal;
 - b. Data yang ada belum dapat digunakan secara optimal;
 - c. Jumlah tenaga dan Sumber Daya Manusia yang terbatas sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pelaporan kegiatan, yang pada akhirnya menyulitkan penentuan prioritas/perencanaan Program dan Kegiatan;
 - d. Penyusunan Dokumen RDTR untuk beberapa wilayah kecamatan harus tertunda karena adanya Perubahan RTRW yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan;
 - e. Kurangnya SDM Bidang Penataan Ruang;

- f. Belum berjalannya TPJK serta pelaksanaan Sistem Informasi jasa konstruksi dan pemanfaatan ruang secara realtime (bisa diketahui dan diupdate setiap saat)
- g. Konflik horizontal terhadap warga sekitar lokasi pekerjaan.
- h. Masih terjadi deviasi pemanfaatan ruang sebesar 20%;
- i. Belum tersusunnya RDTRK masing-masing kecamatan;
- j. Belum efektifnya pengelolaan tata ruang daerah.

Dampak dari permasalahan dan hambatan tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah yang juga berimplikasi pada capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals).

Sementara itu Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah selalu bervariasi setiap tahunnya. Adapun tantangan dan peluang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Peluang Organisasi
 - a. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan meningkat;
 - b. Tingkat kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan meningkat;
 - c. Dukungan data dan informasi yang semakin meningkat;
 - d. Lingkungan kerja yang memadai;
 - e. Adanya program diklat teknis;
 - f. Koordinasi Lintas Sektoral terjalin cukup baik.
2. Tantangan Organisasi
 - a. Letak geografis Kabupaten Mojokerto adalah pegunungan;
 - b. Keadaan tanah utamanya utara Sungai Brantas kurang subur;
 - c. Kurangnya kualitas sumber daya manusia pelaksana lapangan khususnya mitra kerja;
 - d. Banyaknya kualitas daerah/jaringan irigasi, jalan dan prasarana jalan, prasarana permukiman, dan gedung instansi pemerintah belum memadai;

Isu-isu penting dan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024 adalah :

1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana air bersih, air limbah, drainase, persampahan dalam rangka upaya pemenuhan universal access 100-0-100 (SDGs);
2. Peningkatan jalan kabupaten masih belum 100% dan kondisi jembatan belum sesuai lebar jalan yang ada.
3. Peningkatan penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai persyaratan teknis dan administrative.
4. Mengoptimalkan Pengelolaan infrastruktur Sumber Daya Air (Irigasi) melalui peningkatan kualitas infrastruktur Sumber Daya Air (Irigasi).
5. Pemenuhan data teknis yang belum dimiliki (RTH, jaringan drainase, jaringan persampahan, dll) dalam rangka pencapaian target penyusunan RDTR serta mempercepat proses pengesahan Perda RTRW yang sudah direview.
6. Peningkatan penyelenggaraan jasa konstruksi tingkat kabupaten.
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal dan Rancangan RKPD

Dalam rangka penyesuaian kebutuhan anggaran program dan kegiatan tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto melakukan analisis terhadap terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dan Rancangan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024. Dari hasil analisis tersebut terdapat beberapa temuan untuk kami tindaklanjuti meliputi :

1. Usulan langsung Aspirasi Masyarakat pada aplikasi SIPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto;
2. Terdapat Rumusan Program, Kegiatan yang tidak terdapat pada Rancangan Awal dan Rancangan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024;
3. Terdapat perbedaan nilai besaran pagu anggaran yang dibutuhkan pada program, kegiatan.

Berikut hasil review terhadap Rancangan Awal dan Rancangan RKPD Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mojokerto

Lembar 1
dari 1

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/Kegiata n	Lokas i	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	Program/Kegiata n	Lokas i	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Program/K egiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Persentase target Kinerja OPD yang terpenuhi			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Persentase target Kinerja OPD yang terpenuhi			
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersusun</i>			<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersusun</i>			
1. 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojok erto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokume n	15.000.00 0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojok erto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokume n	15.000.000	

1. 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	350.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	350.000.000	
1. 3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	15.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN terbayar gaji dan tunjangannya			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN terbayar gaji dan tunjangannya			
2. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	218 Orang/ bulan	22.809.784.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	218 Orang/ bulan	22.809.784.000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase aset OPD yang tercatat dan dilaporkan			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase aset OPD yang tercatat dan dilaporkan			

3. 1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Mojok erto	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokum en	50.000.00 0	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Mojok erto	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokum en	50.000.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksana			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksana			
4. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Kab. Mojok erto	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	36.900.00 0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Kab. Mojok erto	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	36.900.000	
4. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojok erto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	125.000.0 00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojok erto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	125.000.00 0	
4. 3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojok erto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	94.500.00 0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojok erto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	94.500.000	

4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	90.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	90.000.000	
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	50.000.000	
4.6	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	150.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	150.000.000	
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	200.000.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			

5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	280.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	280.000.000	
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.600.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.600.000.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara			
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit	299.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit	299.500.000	

6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Mojokerto	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	35 unit	300.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Mojokerto	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	35 unit	300.000.000	
6.3	Pemeliharaan Mebel	Kab. Mojokerto	Jumlah Mebel yang dipelihara	30 unit	15.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Mojokerto	Jumlah Mebel yang dipelihara	30 unit	15.000.000	
6.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	50.000.000	
6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	150.000.000	
6.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	200 unit	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	200 unit	75.000.000	

II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase panjang jaringan irigasi (Primer, Sekunder, Tersier) dalam kondisi baik			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase panjang jaringan irigasi (Primer, Sekunder, Tersier) dalam kondisi baik			
7	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SDA terkelola			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SDA terkelola			
7.1	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 unit	200.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 unit	200.000.000	
7.2	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	200.000.000	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	200.000.000	

8	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jaringan irigasi yang dikelola (dipelihara/direhabilitasi) dari total jaringan irigasi kewenangan			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jaringan irigasi yang dikelola (dipelihara/direhabilitasi) dari total jaringan irigasi kewenangan			
8.1	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Mojokerto	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		4.000.000.000	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Mojokerto	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		4.000.000.000	
8.2	Peningkatan Bendung Irigasi	Kab. Mojokerto	Jumlah bendung irigasi yang ditingkatkan	2 bendung	2.500.000.000	Peningkatan Bendung Irigasi	Kab. Mojokerto	Jumlah bendung irigasi yang ditingkatkan	2 bendung	2.500.000.000	
8.3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Mojokerto	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	4 km	4.000.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Mojokerto	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	4 km	4.000.000.000	
8.4	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Kab. Mojokerto	Jumlah Bendung irigasi yang direhabilitasi	4 bendung	3.000.000.000	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Kab. Mojokerto	Jumlah Bendung irigasi yang direhabilitasi	4 bendung	3.000.000.000	

8. 5	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Mojokerto	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		3.000.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Mojokerto	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		3.000.000.000	
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten			
9	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui kegiatan penyediaan SPAM</i>			<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui kegiatan penyediaan SPAM</i>			

9.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kab. Mojokerto	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	4 Dokumen	440.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kab. Mojokerto	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	4 Dokumen	440.000.000	
9.2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Mojokerto	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya/SPAM Berbasis Masyarakat	3200 SR	14.800.000.000	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Mojokerto	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya/SPAM Berbasis Masyarakat	3200 SR	14.800.000.000	
9.3	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Mojokerto	Jumlah rumah tangga terlayani SPAM (SR)	600 SR	0	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Mojokerto	Jumlah rumah tangga terlayani SPAM (SR)	600 SR	0	
9.4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Mojokerto	Jumlah rumah tangga terlayani SPAM (SR)	2600 SR	0	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Mojokerto	Jumlah rumah tangga terlayani SPAM (SR)	2800 SR	0	
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R			

10	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah desa yang disediakan TPS/TPST/TPS3R			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah desa yang disediakan TPS/TPST/TPS3R			
10.1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Mojokerto	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	5500 Rumah Tangga	9.919.969.768	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Mojokerto	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	5500 Rumah Tangga	9.919.969.768	
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T			

1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar			
11.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	250.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	250.000.000	
11.2	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kab. Mojokerto	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	500 Rumah Tangga	5.300.000.000	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kab. Mojokerto	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	500 Rumah Tangga	5.300.000.000	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai			
1 2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Panjang Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Panjang Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai			

12.1	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang disusun	2 Dokumen	350.000.000	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang disusun	2 Dokumen	350.000.000	
12.2	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Mojokerto	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	2100 m	2.300.000.000	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Mojokerto	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	2100 m	2.300.000.000	
12.3	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Kab. Mojokerto	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	1500 m	2.150.000.000	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Kab. Mojokerto	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	1500 m	2.150.000.000	
VI I	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Rasio bangunan gedung instansi pemerintah yang laik fungsi			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Rasio bangunan gedung instansi pemerintah yang laik fungsi			
13	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi		Persentase bangunan gedung instansi pemerintah kondisi baik			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi		Persentase bangunan gedung instansi pemerintah kondisi baik			

	Bangunan Gedung					Bangunan Gedung					
13.1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kab. Mojokerto	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen	150.000.000	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kab. Mojokerto	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen	150.000.000	

13.2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	14 Dokumen	9.200.000.000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	14 Dokumen	9.200.000.000	
13.3	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah konsultasi bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	50.000.000	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah konsultasi bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	50.000.000	
13.4	Penilikan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh penilik bangunan	Kab. Mojokerto	Jumlah bangunan gedung yang telah dilakukan penilikan oleh penilik bangunan	25 unit	50.000.000	Penilikan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh penilik bangunan	Kab. Mojokerto	Jumlah bangunan gedung yang telah dilakukan penilikan oleh penilik bangunan	25 unit	50.000.000	
13.5	Pemeriksaan kelaikan fungsi rumah tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka penerbitan sertifikat laik fungsi	Kab. Mojokerto	Jumlah rumah tinggal tunggal dan rumah deret yang telah dilakukan pemeriksaan kelaikan fungsi	50 unit	50.000.000	Pemeriksaan kelaikan fungsi rumah tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka penerbitan sertifikat laik fungsi	Kab. Mojokerto	Jumlah rumah tinggal tunggal dan rumah deret yang telah dilakukan pemeriksaan kelaikan fungsi	50 unit	50.000.000	

VI II	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
1 4	<i>Penyelenggara an Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</i>					<i>Penyelenggara an Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</i>					
14 .1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	
14 .2	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	375.000.000	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	375.000.000	
IX	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN		Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik			PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN		Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik			
1 5	<i>Penyelenggara an Jalan Kabupaten/Kota</i>		<i>Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik</i>			<i>Penyelenggara an Jalan Kabupaten/Kota</i>		<i>Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik</i>			

15 .1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Mojok erto	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1 Dokum en	100.000.0 00	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Mojok erto	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1 Dokum en	100.000.00 0	
15 .2	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kab. Mojok erto	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	42 km	130.300.0 00.000	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kab. Mojok erto	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	42 km	101.084.74 1.351	
15 .3	Rekonstruksi Jalan	Kab. Mojok erto	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	3 km	16.700.00 0.000	Rekonstruksi Jalan	Kab. Mojok erto	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	3 km	16.700.000. 000	
15 .4	Rehabilitasi Jalan	Kab. Mojok erto	Panjang Jalan yang Direhabilitasi		6.300.000. 000	Rehabilitasi Jalan	Kab. Mojok erto	Panjang Jalan yang Direhabilitasi		6.300.000.0 00	
15 .5	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Mojok erto	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	50 km	20.100.00 0.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Mojok erto	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	50 km	20.100.000. 000	
15 .6	Pembangunan Jembatan	Kab. Mojok erto	Panjang Jembatan yang Dibangun	53 m	8.800.000. 000	Pembangunan Jembatan	Kab. Mojok erto	Panjang Jembatan yang Dibangun	53 m	8.800.000.0 00	
15 .7	Pelebaran Jembatan	Kab. Mojok erto	Panjang jembatan yang dilakukan pelebaran	44 m	2.500.000. 000	Pelebaran Jembatan	Kab. Mojok erto	Panjang jembatan yang dilakukan pelebaran	44 m	2.500.000.0 00	

15.8	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Mojokerto	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	300 m	1.566.108.000	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Mojokerto	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	300 m	1.566.108.000	
X	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		-			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		-			
16	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih			
16.1	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Mojokerto	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	150 orang	680.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Mojokerto	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	150 orang	680.000.000	
17	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Informasi jasa konstruksi			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Informasi jasa konstruksi			
17.1						Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Mojokerto	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	10 Laporan	100.000.000	

17.2	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	2 Orang	50.000.000	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	2 Orang	50.000.000	
17.3	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Kab. Mojokerto	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 dokumen	150.000.000	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Kab. Mojokerto	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 Dokumen	150.000.000	
18						Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Persentase ketertiban usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi			
18.1						Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Mojokerto	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100 Orang	50.000.000	

18.2						Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Mojokerto	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	10 Laporan	50.000.000	
XI	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang			
19	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Persentase dokumen tata ruang yang tersusun			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Persentase dokumen tata ruang yang tersusun			

19 .1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	400.000.000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen			400.000.000
20	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Persentase permintaan informasi tata ruang yang tertangani</i>			<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Persentase permintaan informasi tata ruang yang tertangani</i>				
20 .1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen			150.000.000
21	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Persentase pemanfaatan ruang daerah sesuai rencana tata ruang</i>			<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Persentase pemanfaatan ruang daerah sesuai rencana tata ruang</i>				

20 .2	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Mojok erto	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokum en	350.000.0 00	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Mojok erto	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokum en	350.000.00 0	
Jumlah					277.236.7 61.768					248.221.50 3.119	

**Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2024
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mojokerto

Lembar 1
dari 1

No	Rancangan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/Kegiata n	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	Program/Kegiata n	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Program/K egiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Persentase target Kinerja OPD yang terpenuhi			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Persentase target Kinerja OPD yang terpenuhi			
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersusun</i>			<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersusun</i>			
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojok erto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokume n	15.000.00 0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojok erto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokume n	15.000.000	

1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	350.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	350.000.000	
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	15.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN terbayar gaji dan tunjangannya			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN terbayar gaji dan tunjangannya			
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	218 Orang/bulan	22.809.784.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	218 Orang/bulan	22.809.784.000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase aset OPD yang tercatat dan dilaporkan			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase aset OPD yang tercatat dan dilaporkan			

3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksana			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksana			
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	36.900.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	36.900.000	
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	125.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	125.000.000	
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	94.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	94.500.000	

4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	90.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	90.000.000	
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	50.000.000	
4.6	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	150.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	150.000.000	
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	250.000.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			

5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	280.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	280.000.000	
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.600.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.600.000.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara			
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit	299.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit	299.500.000	

6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Mojokerto	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	35 unit	300.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Mojokerto	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	35 unit	300.000.000	
6.3	Pemeliharaan Mebel	Kab. Mojokerto	Jumlah Mebel yang dipelihara	30 unit	15.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Mojokerto	Jumlah Mebel yang dipelihara	30 unit	15.000.000	
6.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	128.000.000	
6.5	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	150.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	150.000.000	
6.6	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	200 unit	75.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	200 unit	75.000.000	

II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase panjang jaringan irigasi (Primer, Sekunder, Tersier) dalam kondisi baik			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase panjang jaringan irigasi (Primer, Sekunder, Tersier) dalam kondisi baik			
7	<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Persentase SDA terkelola</i>			<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Persentase SDA terkelola</i>			
7.1						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	120.000.000	
7.2	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 unit	200.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 unit	400.000.000	

7.3	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	200.000.000	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	150.000.000	
8	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jaringan irigasi yang dikelola (dipelihara/direhabilitasi) dari total jaringan irigasi kewenangan			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jaringan irigasi yang dikelola (dipelihara/direhabilitasi) dari total jaringan irigasi kewenangan			
8.1	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Mojokerto	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		4.000.000.000	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Mojokerto	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		1.827.648.576	
8.2	Peningkatan Bendung Irigasi	Kab. Mojokerto	Jumlah bendung irigasi yang ditingkatkan	2 bendung	2.500.000.000	Peningkatan Bendung Irigasi	Kab. Mojokerto	Jumlah bendung irigasi yang ditingkatkan	2 bendung	938.588.313	

8.3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Mojokerto	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	4 km	4.000.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Mojokerto	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	5,1 Km	3.857.688.409	
8.4	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Kab. Mojokerto	Jumlah Bendung irigasi yang direhabilitasi	4 bendung	3.000.000.000	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Kab. Mojokerto	Jumlah Bendung irigasi yang direhabilitasi	9 bendung	9.438.301.882	
8.5	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Mojokerto	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		3.000.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Mojokerto	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		4.500.000.000	
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten			

9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui kegiatan penyediaan SPAM			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui kegiatan penyediaan SPAM			
9.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kab. Mojokerto	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	4 Dokumen	440.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kab. Mojokerto	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	5 Dokumen	550.000.000	
9.2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipedaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Mojokerto	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya/SPAM Berbasis Masyarakat	3200 SR	14.800.000.000	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipedaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Mojokerto	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya/SPAM Berbasis Masyarakat	0 SR	0	
9.3	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipedaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Mojokerto	Jumlah rumah tangga terlayani SPAM (SR)	600 SR	0	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipedaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Mojokerto	Jumlah rumah tangga terlayani SPAM (SR)	350 SR	2.779.893.700	

9.4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Mojokerto	Jumlah rumah tangga terlayani SPAM (SR)	2800 SR	0	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Mojokerto	Jumlah rumah tangga terlayani SPAM (SR)	1050 SR	6.497.981.490	
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3 R			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3 R			
10	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah desa yang disediakan TPS/TPST/TPS3 R			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah desa yang disediakan TPS/TPST/TPS3 R			
10.1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	Kab. Mojokerto	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	5500 Rumah Tangga	9.919.969.768	Pembangunan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	Kab. Mojokerto	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	1750 Rumah Tangga	4.620.000.000	

V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T			
11	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar</i>			<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar</i>			
11.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	250.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen	0	

11.2	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kab. Mojokerto	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	500 Rumah Tangga	5.300.000.000	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kab. Mojokerto	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	394 Rumah Tangga	4.236.801.300	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai			
12	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Panjang Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai</i>			<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Panjang Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai</i>			
12.1	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang disusun	2 Dokumen	350.000.000	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang disusun	2 Dokumen	440.000.000	
12.2	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Mojokerto	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	2100 m	2.300.000.000	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Mojokerto	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1615 m	5.008.859.000	

12.3	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Kab. Mojokerto	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	1500 m	2.150.000.000	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Kab. Mojokerto	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	1527 m	5.002.857.000	
VII	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Rasio bangunan gedung instansi pemerintah yang laik fungsi			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Rasio bangunan gedung instansi pemerintah yang laik fungsi			
13	<i>Penyelenggara an Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>		<i>Persentase bangunan gedung instansi pemerintah kondisi baik</i>			<i>Penyelenggara an Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>		<i>Persentase bangunan gedung instansi pemerintah kondisi baik</i>			

13.1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kab. Mojokerto	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen	150.000.000	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kab. Mojokerto	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen	350.000.000
13.2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	14 Dokumen	9.200.000.000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	18.550.000.000

13.3	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah konsultasi bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	50.000.000	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah konsultasi bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	50.000.000	
13.4	Penilikan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh penilik bangunan	Kab. Mojokerto	Jumlah bangunan gedung yang telah dilakukan penilikan oleh penilik bangunan	25 unit	50.000.000	Penilikan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh penilik bangunan	Kab. Mojokerto	Jumlah bangunan gedung yang telah dilakukan penilikan oleh penilik bangunan	25 unit	100.000.000	
13.5	Pemeriksaan kelaikan fungsi rumah tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka penerbitan sertifikat laik fungsi	Kab. Mojokerto	Jumlah rumah tinggal tunggal dan rumah deret yang telah dilakukan pemeriksaan kelaikan fungsi	50 unit	50.000.000	Pemeriksaan kelaikan fungsi rumah tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka penerbitan sertifikat laik fungsi	Kab. Mojokerto	Jumlah rumah tinggal tunggal dan rumah deret yang telah dilakukan pemeriksaan kelaikan fungsi	50 unit	50.000.000	
VIII	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
14	Penyelenggara an Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					Penyelenggara an Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					

14.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	185.000.000	
14.2	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	375.000.000	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	150.000.000	
IX	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik			
15	Penyelenggara an Jalan Kabupaten/Kota		Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik			Penyelenggara an Jalan Kabupaten/Kota		Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik			
15.1						Pengelolaan Leger Jalan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	1 Dokumen	135.000.000	
15.2	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Mojokerto	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1 Dokumen	100.000.000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Mojokerto	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1 Dokumen	100.000.000	

15.3	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kab. Mojokerto	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	42 km	101.084.741.351	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kab. Mojokerto	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	46,667 km	171.065.233.497	
15.4	Rekonstruksi Jalan	Kab. Mojokerto	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	3 km	16.700.000.000	Rekonstruksi Jalan	Kab. Mojokerto	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	15,174 km	57.609.117.325	
15.5	Rehabilitasi Jalan	Kab. Mojokerto	Panjang Jalan yang Direhabilitasi		6.300.000.000	Rehabilitasi Jalan	Kab. Mojokerto	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1,46359 km	6.850.000.000	
15.6						Pemeliharaan Berkala Jalan	Kab. Mojokerto	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	35,893 km	78.581.169.338	
15.7	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Mojokerto	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	50 km	20.100.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Mojokerto	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	30 km	20.000.000.000	
15.8	Pembangunan Jembatan	Kab. Mojokerto	Panjang Jembatan yang Dibangun	53 m	8.800.000.000	Pembangunan Jembatan	Kab. Mojokerto	Panjang Jembatan yang Dibangun	266,5 m	63.957.002.125	
15.9	Pelebaran Jembatan	Kab. Mojokerto	Panjang jembatan yang dilakukan pelebaran	44 m	2.500.000.000	Pelebaran Jembatan	Kab. Mojokerto	Panjang jembatan yang dilakukan pelebaran	8,5 m	906.775.000	

15.1 0	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Mojokerto	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	300 m	1.566.108.000	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Mojokerto	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	300 m	1.783.478.272	
X	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		-			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		-			
16	Penyelenggara an Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih			Penyelenggara an Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih			
16.1	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Mojokerto	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	150 orang	680.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Mojokerto	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	50 orang	400.000.000	
17	Penyelenggara an Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Informasi jasa konstruksi			Penyelenggara an Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Informasi jasa konstruksi			

17.1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Mojokerto	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	10 Laporan	100.000.00	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Mojokerto	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	10 Laporan	100.000.00	
17.2	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	2 Orang	50.000.00	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	0 Orang	0	
17.3	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Kab. Mojokerto	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 Dokumen	150.000.00	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Kab. Mojokerto	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	0 Dokumen	0	
18	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Persentase ketertiban usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Persentase ketertiban usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi			

18.1	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Mojokerto	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100 Orang	50.000.000	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Mojokerto	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100 Orang	280.000.000	
18.2	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Mojokerto	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	10 Laporan	50.000.000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Mojokerto	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	10 Laporan	100.000.000	
XI	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG		Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG		Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang			

19	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Persentase dokumen tata ruang yang tersusun			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Persentase dokumen tata ruang yang tersusun			
19.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	400.000.000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	951.785.500	
20	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase permintaan informasi tata ruang yang tertangani			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase permintaan informasi tata ruang yang tertangani			
20.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	150.000.000	

21	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemanfaatan ruang daerah sesuai rencana tata ruang			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemanfaatan ruang daerah sesuai rencana tata ruang		
21.1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	350.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	350.000.000
Jumlah					248.221.503.119					500.006.864.726

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam tabel berikut kami tampilkan usulan program/kegiatan yang bersumber dari Masyarakat serta pemangku kepentingan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) :



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jalan Jenderal A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur
 Telp. (0321) 321262 – 325919 Fax. (0321) 321262
 Website : [Http://www.bappedamojokertokab.go.id](http://www.bappedamojokertokab.go.id)

<p>Nomor : 050/1176/416-201.I/2023 Sifat : Penting Lamp : 1 (satu) bendel Perihal : Laporan Hasil Rapat Kerja Sinkronisasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dalam rangka Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2024</p>	<p>Mojokerto, 15 Mei 2023 Kepada Yth. Ibu Bupati Mojokerto di- MOJOKERTO</p>
---	---

Sehubungan dengan telah dilaksanakan Rapat Kerja Sinkronisasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dalam rangka Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2024 tanggal 21 Maret 2023, bertempat di Ruang Rapat Lt.2 Bappeda Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto Nomor : 005/655/416-201.I/2023 tanggal 14 Maret 2023 perihal Undangan, maka kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

A. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan Rapat Kerja Sinkronisasi Bidang Infrastruktur dan Keciaptakarya dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah sarana komunikasi interaktif dan dialogis antara seluruh pemangku kepentingan pembangunan infrastruktur dan keciaptakarya di Kabupaten Mojokerto bidang Infrastruktur dan keciaptakarya dalam rangka memahami permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan strategis Pemerintah Daerah.

Tujuan pelaksanaan Rapat Kerja Sinkronisasi Bidang Infrastruktur dan Keciaptakarya dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 diantara lain :

1. Menstrukturalkan permasalahan, mencapai kesepakatan prioritas isu dan permasalahan daerah, serta mekanisme penanganannya;
2. Mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendekatan “*top-down*” dengan “*bottom-up*”, pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat (*community need assessment*) dengan penilaian yang bersifat teknis (*technical assessment*);
3. Mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendekatan resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan *non government stakeholders* untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan;
4. Mereview usulan prioritas berdasarkan BA Musrencam dengan usulan Aspirasi Masyarakat yang telah diinput pada SIPD;
5. Mereview kewenangan perangkat daerah berdasarkan nomenklatur sub kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2023;
6. Mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan;

B. Peserta Rapat

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto;
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto;
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto;
7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mojokerto;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto;
9. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto;
10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto;
11. Kepala Bagian Adminitrasi Pembangunan setda Kabupaten Mojokerto;
12. Camat Jatirejo;
13. Camat Mojoanyar;
14. Camat Dawarblandong;
15. Camat Mojosari;
16. Camat Ngoro;
17. Camat Kemlagi;
18. Camat Jetis;
19. Camat Gedeg;
20. Camat Trowulan;
21. Camat Bangsal;
22. Camat Pungging;
23. Camat Trawas;
24. Camat Pacet;
25. Camat Dlanggu;
26. Camat Kutorejo;
27. Camat Sooko;
28. Camat Puri;
29. Camat Gondang;

C. Narasumber/ Pembahas

1. Ibu Bupati Mojokerto sebagai Keynote Speaker
2. Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan setda Kabupaten Mojokerto

D. Hasil Rapat Kerja Sinkronisasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

1. Usulan Prioritas Kecamatan berdasarkan atas Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 yang disampaikan Camat/ Perwakilan Cama se-Kabupaten Mojokerto, sebagaimana terlampir.

2. Prioritas Kecamatan akan disinkronkan dengan kebutuhan, penilaian (*assessment*) dan perencanaan Perangkat Daerah yang akan dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah dan sebagai bahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan.
3. Usulan Aspirasi Masyarakat yang dapat dianggarkan melalui skema Bantuan Keuangan Desa untuk diarahkan/ dianggarkan melalui Pokir Dewan.
4. Usulan Aspirasi Masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pusat, untuk di rekapitulasi dan diusulkan ke Pemerintah Provinsi dan Pusat sesuai kewenangannya terutama usulan yang berkenaan dengan mitigasi dan penanggulangan bencana alam.
5. Isu Pembangunan terkait permasalahan bencana menjadi prioritas daerah untuk ditangani dan diselesaikan, agar selanjutnya tidak menjadi penyebab bencana berikutnya.
6. Usulan Aspirasi Masyarakat Pembangunan TPS3R (Tempat Pembuangan Sampah *Reduce, Reuse and Recycle*) agar disiapkan :
 - a. Perangkat Daerah terkait membuat SOP (*Standart Operating Procedure*) dalam memverifikasi usulan Pembangunan TPS3R;
 - b. Surat Pernyataan bilamana TPS3R tidak dioperasionalkan, Pemdes untuk mengembalikan uang/ anggaran pembangunan;
 - c. Diutamakan bagi Desa yang telah mempunyai pokmas/lembaga pengelola sampah;
 - d. setelah TPS3R dibangun pihak desa harus siap untuk menganggarkan operasional.
7. Perlu adanya perencanaan terpadu terkait pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Trawas serta sangat diharapkan ada peran swasta (pelaku wisata) dalam membangun infrastruktur di Kecamatan Trawas khususnya infrastruktur yang terkait dengan mitigasi bencana alam disekitar objek wisata yang dikelola oleh pihak swasta.
8. Pembangunan infrastruktur merupakan salah mandatory spending yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Yang mana Rasio prosentase Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur terhadap Dana Transfer Umum yang diperhitungkan harus memenuhi porsi 40%.

Demikian laporan kami untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Tembusan Yth.

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN MOJOKERTO,**



Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660618 199003 1 011

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Lampiran Surat Kepala Bappeda Kab. Mojokerto
 Nomor : 050/1176/416-201.I/2023
 Tanggal : 15 Mei 2023

**HASIL RAPAT KERJA SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
 BIDANG INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA
 PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD TAHUN 2024**

No	Kecamatan	Usulan Prioritas Hasil Berita Acara Musrenbang Kecamatan dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024	Keterangan
1	Dlanggu	a. Ruas Jalan Ngembah – Mojokarang b. Ruas Jalan Dlanggu – Sumberkarang c. Ruas Jalan Pekingan - Randugenengan d. Ruas Jalan Mojokarang – Kalen (Prioritas 2)	
2	Mojosari	a. DAM Kedunggempol (Kewenangan Provinsi) b. Tanggul Sungai Sumberkembar / Kebondalem (Kewenangan BBWS) c. Drainase Jalan Pemuda Mojosari (Kewenangan Provinsi) d. Jalan Modopuro – Leminggir	
3	Pacet	Tidak Hadir	
4	Trawas	a. Trotoar Puncak Trawas b. Drainase Kesiman – Ketapanrame c. Jalan Tergerus Baratnya Sendang Raos d. Jembatan Kedung udi (Prioritas 2) e. Jembatan Kemendung Penanggungan (Prioritas 2) f. Ruas Jalan Kemloko – Kesiman	
5	Mojoanyar	a. Jalan Jumeneng – Puloniti b. Ruas jalan Kepuhanyar - Bangsal c. Jembatan Gebangmalang (depan pabrik tahu) d. TPS3R dengan lokasi Lengkong, Gayaman dan Kepuhanyar e. Drainase Lengkong	
6	Gedeg	a. Jalan Gempolkerep (Kewenangan Desa) b. Jalan Gedeg (Kewenangan Desa) c. Jembatan Kemantren d. Normalisasi Sungai Ngares – Gedeg dan Dsn Lamong e. TPS3R Kemantren (Lahan LP2B)	
7	Sooko	a. Ruas Jalan Ngingasrembyong – Keprabon b. Ruas Jalan Wringinrejo – Blooto c. Ruas Jalan Wringinrejo – Kedungmaling d. Ruas Jalan Karangkedawang – Kedawung e. Drainase Brangkal	
8	Dawarblandong	a. Jembatan Cinandang I (penyempitan jalan) b. Jalan Temuireng – Gunungan	
9	Ngoro	a. Jalan Drainase Ngoro (kewenangan Pemerintah Pusat) b. Jalan Ngoro – Kunjorowesi c. Jalan Manduro – Kunjorowesi	

Catatan :

No	Kecamatan	Usulan Prioritas Hasil Berita Acara Musrenbang Kecamatan dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024	Keterangan
		d. Box Culvert Kutogirang – Jolotundo e. Kolam Retensi Kembangsri/ Candiharjo (Tematik Anak) f. Alun-alun/ RTH Kecamatan Ngoro di Desa Sedati (Tematik Anak) g. Jalan Jasem – Tanjatrono h. Jalan SMP Ngoro (APBD 2023) i. Jalan Watesnegoro – Candiharjo (SMA Ngoro)	
10	Trowulan	a. Jalan Ruas Modongan – Watesumpak b. TPT Wonorejo SMPN 1 c. TPT Ngliguk d. Jalan Poros Pakis – Dukuhngarjo e. Poros Pakis – Watesumpak f. SMP Trowulan (Banjir) g. Puskesmas Trowulan	
11	Kemlagi	a. Ruas Jalan Rumbukidul – Semampir Kidul (2 km) b. Ruas Jalan Mojowiryo – Mojosarirejo (kea rah Jombang) c. Jalan menuju SMKN Kemlagi (Mojowono – Mojogebang) d. Ruas Jalan Japanan – Beratkulon e. Ruas Jalan Kemalgi – Beratkulon	
12	Puri	a. Ruas Jalan Banjaragung – Sawo b. Drainase Dusun Tegalsari Desa Puri c. Lanjutan Jalan Medali (Banjaragung – Sawo) d. Jalan Brangkal – Badung e. Plengsengan Banjaragung f. Jembatan Sumolawang	
13	Jetis	a. Drainase b. Normalisasi Sungai c. Jalan Jolotundo – Mojorejo d. Jalan Banjarsari – Japanan e. TPS3R Mlirip f. TPS3R Sidoharjo g. Jalan Bendung – Bantengan	
14	Kutorejo	a. Jembatan Kandang (Kertosari - Payungrejo) b. Jalan Ruas Ngastemi – Kepuhpandak	
15	Jatirejo	a. Jalan Legundi – Manting (Rejosari) b. Jalan Baureno – Sumberjati c. Jalan Dusun Dinoyo – Kletek (BK Desa) d. Jembatan Sumengko (APBD 2023) e. Jembatan Bleberan (BK Desa)	
16	Gondang	a. Jembatan Kalikatur b. Jalan Wonoploso – Begaganlimo c. Jalan Jatidukuh – Ngambat (diaspal P-APBD 2023)	
17	Pungging	a. Jalan Sekargadung – Purwojati	

No	Kecamatan	Usulan Prioritas Hasil Berita Acara Musrenbang Kecamatan dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024	Keterangan
		b. Jembatan Randuharjo	
18	Bangsal	a. Ruas Jalan Ngrowo – Salen b. Ruas Jalan Ngrowo – Tinggarbuntut	

USULAN ASPIRASI MASYARAKAT SIPD 2024

Tanggal Pengajuan	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Alamat
26/01/2023	UMBAR MULYADI	Saluran Irigasi Kurang Memadai	Pembangunan / Peningkatan dan Rehabilitasi Drainase (BK Desa - Umum)	Dusun Mligi, Kab. Mojokerto, Pacet, Claket
27/01/2023	Hj. Zuli Astutik	Tembok saluran irigasi yang rusak sehingga aliran air tidak bisa mengalir sebagaimana mestinya	Pembangunan / Peningkatan dan Rehabilitasi Drainase (BK Desa - Umum)	Dusun Pekukuhan RT. 010 RW. 004, Kab. Mojokerto, Mojosari, Pekukuhan
02/02/2023	A. MUSLIK	adanya kerusakan jembatan dan sempitnya jembatan sehingga mengganggu lalu lintas masyarakat sekitar dan menjadi rawan kecelakaan. sehingga kami mengajukan pelebaran jembatan dengan ukuran 6x20 meter dan estimasi dana Rp. 400.000.000 agar lalu lintas berjalan lancar.	#BK PELEBARAN JEMBATAN	dusun setoyo, Kab. Mojokerto, Puri, Balongmojo

02/02/2023	A. MUSLIK	<p>banyaknya kecelakaan yang terjadi di jalan dusun karangnongko dikarenakan tidak adanya talud atau penahan tanah dipinggir jalan tersebut. perlu di bangun penahan tanah/ talud sebagai sarana pelengkap jalan tersebut dengan ukuran 1x0,80x600 meter dan estimasi dana Rp. 350.000.000. apabila tidak dibangun penahan tanah/ talud tersebut maka tidak akan meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas.</p>	#BKD PENAHAN TANAH	dusun karangnongko, Kab. Mojokerto, Puri, Balongmojo
02/02/2023	A. MUSLIK	<p>banyaknya kecelakaan yang terjadi di jalan menuju makam dusun karangnongko dikarenakan tidak adanya talud atau penahan tanah dipinggir jalan tersebut. perlu di bangun penahan tanah/ talud sebagai sarana pelengkap jalan tersebut dengan ukuran 2x0,80x350 meter dan estimasi dana Rp. 300.000.000. apabila tidak dibangun</p>	#BKD PENAHAN TANAH	dusun karangnongko, Kab. Mojokerto, Puri, Balongmojo

		penahan tanah/ talud tersebut maka tidak akan meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas.		
04/02/20 23	NUR ELY SURYANI	TERSUMBATNY A SALURAN AKIBAT BANJIR SEHINGGA TERJADI LUAPAN AIR DI SEKITAR RUMAH WARGA KETIKA HUJAN	Belum tersedia sistem drainase, Sering terjadi luapan air, Terjadi genangan air, Sistem drainase yang ada tidak mencukupi, Adanya kerusakan dari sistem drainase yang ada	Jl. PERJUANGA N DUSUN BRANGKAL DESA BRANGKAL, Kab. Mojokerto, Sooko, Brangkal
04/02/20 23	NUR ELY SURYANI	pengelolaan irigasi dari hulu sampai dengan hilir rusak sehingga pembagian kebutuhan air tidak maksimal	Jaringan irigasi memerlukan rehabilitasi	DUSUN BRANGKAL DESA BRANGKAL, Kab. Mojokerto, Sooko, Brangkal

07/02/2023	PATUH WAHYUDI, SE	Kondisi jalan banyak yang berlubang, dan bukan wewenang desa, Volume 300 m x 3m, membutuhkan biaya Rp. 300.000.000	Jalan memerlukan pemeliharaan berkala	Jalan Poros Desa Blimbingsari, Kab. Mojokerto, Sooko, Blimbingsari
07/02/2023	AL ADZIM, M.Si.	jalan poros desa dengan ruas brejel-bangeransuru milik pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto kondisi rusak parah	Jalan perlu direkonstruksi	brejel-bangeransuru, Kab. Mojokerto, Dawarblondong, Bangeran
08/02/2023	DONY BUDI SETIAWAN	Arus lalu lintas ke Pasar, Sekolahan dll yang begitu ramai sering terjadi Kecelakaan sehingga perlu dibangun Jembatan untuk mengurangi resiko kecelakaan.	Jembatan perlu dibangun	Desa Jampirogo - Desa Sambiroto Kec.Sooko, Kab. Mojokerto, Sooko, Jampirogo
08/02/2023	DONY BUDI SETIAWAN	Luapan air musim penghujan dari Jalan Raya RA.Basuni membuat banjir di lingkungan Desa Jampirogo Kec.Sooko Kab.Mojokerto.	Belum tersedia sistem drainase, Sering terjadi luapan air, Terjadi genangan air, Sistem drainase yang ada tidak mencukupi, Adanya kerusakan dari sistem drainase yang ada	Desa Jampirogo, Kab. Mojokerto, Sooko, Jampirogo
09/02/2023	DWI SISWARINI	jembatan rusak berat	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Jembatan	desa mlaten, Kab. Mojokerto, Puri, Mlaten

			(BK Desa - Umum)	
09/02/2023	ARIF RAHMAN	jalan rusak perlu di perbaiki	Jalan rusak	Jalan Raya Tawangrejo, Kab. Mojokerto, Jatirejo, Lebakjabung
09/02/2023	DWI SISWARINI	TIDAK TERSEDIA NYA PEMBUANGAN SAMPAH	sarana dan prasarana pengolahan sampah belum ada	DESA MLATEN, Kab. Mojokerto, Puri, Mlaten
09/02/2023	ARIF RAHMAN	Tanggul rusak berat yang mengakibatkan petani mengalami kerugian	Ekoriparian (Upaya pemulihan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS))	Desa Lebakjabung Kecamatan Jatirejo, Kab. Mojokerto, Jatirejo, Lebakjabung
11/02/2023	SUNYOTO	Dikarenakan saluran air atau drainase pada timur jalan yang sudah rusak dan kurang memadai, sehingga pada saat musim penghujan air masuk ke halaman rumah warga, hal ini mengakibatkan keresahan dan kerusakan halaman rumah warga serta lingkungan yang kurang sehat. Jumlah KK yang terdampak adalah 45 KK.	Pembangunan / Peningkatan dan Rehabilitasi Drainase (Bagian Administrasi Pembangunan)	Dusun Banong RT 001 (Timur Jalan Raya), Kab. Mojokerto, Jatirejo, Gebangsari

11/02/2023	SUNYOTO	Dikarenakan belum adanya saluran drainase di wilayah tersebut, sehingga pada saat musim penghujan air masuk ke halaman rumah warga, hal ini mengakibatkan keresahan dan kerusakan halaman rumah warga serta lingkungan yang kurang sehat.	Pembangunan / Peningkatan dan Rehabilitasi Drainase (Bagian Administrasi Pembangunan)	Dusun Gebangsari RT 016 RW 005 (Sebelah Utara Jalan PU), Kab. Mojokerto, Jatirejo, Gebangsari
11/02/2023	SUNYOTO	Dikarenakan akses jalan yang rusak dan kurang memadai, sehingga dapat menghambat aktifitas masyarakat	Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan dan Sarana Pelengkap (Bagian Administrasi Pembangunan)	Dusun Bulaksempu RT 008 - Dusun Gebangsari RT 016, Kab. Mojokerto, Jatirejo, Gebangsari
13/02/2023	Ridwan, SH	Jebolnya Pintu Air (DAM) sehingga area Persawahan mengalami kekeringan	Belum tersedia sistem drainase, Sering terjadi luapan air, Terjadi genangan air, Sistem drainase yang ada tidak mencukupi, Adanya kerusakan dari sistem drainase yang ada	Desa Kedunggempol, Kab. Mojokerto, Mojosari, Kedunggempol

13/02/2023	Ridwan, SH	Rusaknya Skip pada Pintu Air Persawahan	Belum tersedia sistem drainase, Sering terjadi luapan air, Terjadi genangan air, Sistem drainase yang ada tidak mencukupi, Adanya kerusakan dari sistem drainase yang ada	Desa Ngimbangan, Kab. Mojokerto, Mojosari, Kedunggempol
15/02/2023	PURWANTO	JEMBATAN PENGHUBUNG YANG RUSAK KARNA BANGUNAN JAMAN PENJAJAHAN YANG MASIH DIGUNAKAN	Belum tersedia sistem drainase, Sering terjadi luapan air, Terjadi genangan air, Sistem drainase yang ada tidak mencukupi, Adanya kerusakan dari sistem drainase yang ada	DUSUN MOJOGENEN G DESA MOJOKARANG, Kab. Mojokerto, Dlanggu, Mojokarang
16/02/2023	EDY PRABOWO	Drainase mengalami kerusakan berat sehingga aliran air tersumbat dan menyebabkan banjir yang cukup tinggi ketika hujan deras melanda dan hal tersebut sangat mengganggu aktifitas pedagang dan pengendara disekitar jalan tersebut	Pembangunan / Peningkatan dan Rehabilitasi Drainase (BK Desa - Umum)	Jl. Kamas Setyoadi No. 15 Desa Kedungmalin g, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto, Kab. Mojokerto, Sooko, Kedungmalin g

19/02/2023	MOKHAMAD KHOIRUN	Akibat Pendangkalan Sungai Besar yang melintasi wilayah desa Kunitir, mengakibatkan sebagian besar petani di Desa Kunitir selalu gagal panen karena selalu banjir. Dan kalau dam di tutup mengakibatkan konflik antar petani dengan desa lain.	Waduk/ Embung/ Sungai memerlukan pemeliharaan	Wilayah Sawah Pertanian Padi Dusun Kunitir Desa Kunitir, Kab. Mojokerto, Jatirejo, Kunitir
20/02/2023	SUNYOTO	Dikarenakan saluran air atau drainase pada timur jalan yang sudah rusak dan kurang memadai, sehingga pada saat musim penghujan air masuk ke halaman rumah warga, hal ini mengakibatkan keresahan dan kerusakan halaman rumah warga serta lingkungan yang kurang sehat. Jumlah KK yang terdampak adalah 45 KK.	Pembangunan / Peningkatan dan Rehabilitasi Drainase (Bagian Administrasi Pembangunan)	Dusun Banong RT 001 RW 001, Kab. Mojokerto, Jatirejo, Gebangsari
22/02/2023	H.Eko Edu Sutarno,SH	Untuk merawat jalan dan agar tidak terjadi longsor	Simulasi Penanganan Bencana	Dusun Kemantren Wetan RT.01-05 RW.01, Kab. Mojokerto, Gedeg, Terusan
23/02/2023	H.Eko Edu Sutarno,SH	Pengelolaan tempat sampah yang sudah ada kurang memadai dan mengalami penumpukan /	sarana dan prasarana pengolahan sampah belum ada	Dusun Bagus RT.05 RW.03, Kab. Mojokerto, Gedeg, Terusan

		gunungan sampah.		
24/02/2023	WARIJAN	jembatan penghubung antara desa kuripansari dan desa jatijejer kecamatan trawas yang masih sempit mengakibatkan arus lalu lintas dan aktifitas perekonomian warga terganggu.	Pembangunan Jembatan (Bagian Administrasi Pembangunan)	Ruas jln tanjung kenongo-jati jejer (jln Goa Gembyang), Kab. Mojokerto, Pacet, Kuripansari
27/02/2023	H. DUL MUKTI	Jembatan terlalu kecil (kurang lebar) sehingga sering terjadi kemacetan dan sering terjadi kecelakaan.	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Jembatan (BK Desa - Umum)	Jembatan Brugan, Ruas Jalan Purwojati-Trawas, Kab. Mojokerto, Trawas, Kedungudi
27/02/2023	H. DUL MUKTI	Jembatan terlalu kecil (kurang lebar) sehingga sering terjadi kemacetan dan sering terjadi kecelakaan.	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Jembatan (BK Desa - Umum)	Jembatan Mirimonte Ruas Jalan Purwojati-Trawas, Dsn Kedungudi RT 01 RW 01 , Kab. Mojokerto, Trawas, Kedungudi
27/02/2023	H. DUL MUKTI	Jembatan terlalu kecil (kurang lebar) sehingga sering terjadi kemacetan dan sering terjadi kecelakaan.	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Jembatan (BK Desa - Umum)	Jembatan Curah Tapas Ruas Jalan Purwojati-Trawas, Dsn Kedungudi RT 04 RW 01 , Kab. Mojokerto, Trawas, Kedungudi
27/02/2023	H. DUL MUKTI	masyarakat/petani kesulitan menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil pertanian dan harus putar jalan	Jembatan perlu dibangun	Jembatan Wagir Dsn Kedungudi RT 02 / RW 01 , Kab. Mojokerto, Trawas, Kedungudi

27/02/2023	H. DUL MUKTI	Distribusi air ke lahan pertanian tidak lancar sehingga petani kesulitan bahkan kekurangan air untuk mengairi lahan pertanian/sawah terutama pada waktu musim tanam dan musim kemarau	Irigasi rusak	Dsn Kedungudi RT 01 RW 01 Desa Kedungudi , Kab. Mojokerto, Trawas, Kedungudi
27/02/2023	Sampurno	Di beberapa titik di desa Watesnegoro masyarakat masih mengalami krisis dan kualitas air bersih siap konsumsi.	Belum tersedia jaringan perpipaan SPAM untuk memenuhi kebutuhan Air Minum	Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto, Ngoro, Watesnegoro
28/02/2023	RONI HIDAYAT	jembatan tersebut perlu dibangun dikarenakan sangat membantu untuk akses pertanian dan penghubung jalan alternatif antar desa, atara Desa Punggul ke Desa Pohjejer	Pembangunan Jembatan (Bagian Administrasi Pembangunan)	Dusun Dauwan, Kab. Mojokerto, Dlanggu, Punggul
28/02/2023	Hamim Ghozali,S.Pd.I	Tanah Sekitar Sungai Tergerus	Waduk/ Embung/ Sungai memerlukan pemeliharaan	Sungai Dusun Tambakrejo, Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Gayaman
28/02/2023	Priyanto, ST	Tidak tersedia penunjang jalan usaha tani yaitu saluran irigasi. Saluran irigasi yang tidak memadai dan mendukung aktivitas pertanian warga	Pembangunan / Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Sarana Pelengkap (Bagian Administrasi Pembangunan)	Dusun Toyorono Desa Sukoanyar, Kab. Mojokerto, Ngoro, Sukoanyar

01/03/2023	SAGI, ST	Jembatan sudah rusak/rapuh/tidak layak pakai dan cukup berbahaya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Jembatan perlu dibangun	Dusun Grogolgede RT 003 RW 004 Desa Gebangmalang Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto, Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Gebangmalang
01/03/2023	SAGI, ST	Jalan rusak berat dan membayakan bagi pengendara motor	Jalan rusak	Dusun Grogolgede Desa Gebangmalang Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto, Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Gebangmalang
01/03/2023	Indra Ari Kusuma, S.Pd	Jalan sudah waktunya di perbaiki	Jalan perlu direkonstruksi	Dusun Karangbendo Desa Sumberjati Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Sumberjati
01/03/2023	Slamet Hidayat	TPS belum tersedia di Desa Kepuhanyar	sarana dan prasarana pengolahan sampah belum ada	Dusun Wonoayu Desa Kepuhanyar, Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Kepuhanyar
01/03/2023	Slamet Hidayat	Jembatan tidak sesuai kebutuhan warga mohon di rekontruksi	Pembangunan Jembatan (Bagian Administrasi Pembangunan)	Dsn Wonoayu Desa Kepuhanyar, Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Kepuhanyar
02/03/2023	KHAIRUR ROZIKIN	Peningkatan Jalan Lingkungan guna memperlancar mobilitas dan aktifitas	Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan dan Sarana Pelengkap	Dusun Ngumpak Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto

		masyarakat desa	(BK Desa - Umum)	Jawa Timur, Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Jabon
02/03/2023	KHAIRUR ROZIKIN	Normalisasi sungai akibat pendangkalan dan penyempitan aliran sungai	Luapan dan Genangan Air	Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Jabon
06/03/2023	Suyanto FA,SH	Jalan Poros Desa yang sering Rusak Karena Banjir	Jalan perlu direkonstruksi	Dusun Salen dan Dusun Semanggi, Kab. Mojokerto, Bangsal, Salen
08/03/2023	GHIPPA Tirto Sumber Makmur	Rusak berat yang di akibatkan hujan deras dengan intensitas tinggi yang terjadi pada 26 Desember 2015.	Irigasi rusak	Dusun mendek , Kab. Mojokerto, Ngoro, Kutogirang
09/03/2023	CHOSIM,SH	Jalan Rusak berat dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Lebar Jalan Belum Standar	Dsn Kwatu Desa Kwatu Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto , Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Kwatu
15/03/2023	TATAG SUGIANTO, S.Pdi	Tempat Pengolahan Sampah Akhir warga dan lingkungan pondok pesantren belum memadai, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan warga dan meningkatkan ekonomi	sarana dan prasarana pengolahan sampah belum ada	Dusun Mojogeneng RT. 015, Kab. Mojokerto, Jatirejo, Mojogeneng

15/03/20 23	KARSIDI	Jalan Penghubung antara Desa Ngembah dan Desa Sumberkarang kondisinya rusak	Jalan rusak	Dusun Ngembah, Kab. Mojokerto, Dlanggu, Ngembah
15/03/20 23	KARSIDI	Jalan Penghubung antara Desa Ngembah dan Desa Kutoporong kondisinya rusak	Jalan rusak	Dusun Pulosari, Kab. Mojokerto, Dlanggu, Ngembah
15/03/20 23	Ahmad Zaidi	seiring telah berjalan dan beroperasi namun sistem pengelolaan sampah yang ada di desa kemantren kami membutuhkan TPA3R untuk bisa mengelola sampah yg lebih maksimal dengan target permasalahan sampah yang ada wilayah kecamatan gedeg bisa terselesaikan dengan pengelolaan sampah yang ada di Desa KEMANTREN	sarana dan prasarana pengolahan sampah belum ada	DUSUN BANCI DESA KEMANTREN KEC GEDEG, Kab. Mojokerto, Gedeg, Kemantren
15/03/20 23	Saumar, S.Pd.I	tempat pengelolaan sampah belum ada	sarana dan prasarana pengolahan sampah belum ada	DSN. BANGUNREJO RT. 04 RW.02 DESA TAMBAKREJO, Kab. Mojokerto, Ngoro, Tambakrejo
16/03/20 23	SUHARTINI	Jembatan mulai retak dan konstruksi Rapuh tidak memakai besi karena jembatan lama dan jembatan	Jembatan perlu dibangun	Dusun Tambang Desa Karangjeruk, Kab. Mojokerto, Jatirejo, Karangjeruk

		penghubung Kabupaten		
16/03/2023	M.YUSUF WIBISONO,SH	Irigasi Rusak dan Banyak Kebocoran	Jaringan irigasi memerlukan rehabilitasi	Dusun Bangon, Kab. Mojokerto, Jatirejo, Bleberan
16/03/2023	MAT ROSAT	Jalan poros desa ngarjo sampai desa sadartenga rusakakibatnya mengganggu aktifitas warga	Jalan rusak	Desa Ngarjo, Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Ngarjo
16/03/2023	MORSIDI	belum adanya tempat pembuangan sampah	sarana dan prasarana pengolahan sampah belum ada	Dusun Jibru Desa Belik, Kab. Mojokerto, Trawas, Belik
17/03/2023	Andik Wibowo	Kondisi Jalan sudah rusak Berlubang membahayakan kendaraan roda 2 dan roda 4, OPD penanggungjawab DPUPR karena Kewenangan Kabupaten	Jalan perlu direkonstruksi	Dusun Karangasem RT. 026 RW. 009 , Kab. Mojokerto, Gedeg, Pagerluyung
18/03/2023	H. Khusaeni	Anggaran Tidak Mencukupi	Jalan perlu direkonstruksi	Dusun Turi, Kab. Mojokerto, Mojosari, Leminggir
20/03/2023	Fauzi	Jembatan yang lebih sempit dari jalan utama sehingga mengganggu mobilitas warga	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Jembatan (BK Desa - Umum)	Dusun Wonokoyo RT.05 RW.06, Kab. Mojokerto, Mojosari, Sumbertanggul
20/03/2023	Fauzi	TPT sungai besar yang sudah rusak	Ekoriparian (Upaya pemulihan fungsi Daerah Aliran	Dusun Sumbertanggul RT.05 RW.04, Kab. Mojokerto, Mojosari,

			Sungai (DAS))	Sumbertanggul
20/03/2023	Drs. ANANG WAHYUDI	Jalan penghubung antara Dusun Jasem Desa Dinoyo Dengan Dusun Gebangsari Desa Gebangsari Kecamatan Jatirejo yang kondisinya rusak dan sangat kurang layak dan juga jalan tersebut merupakan urat nadi dalam memperlancar lalulintas perekonomian serta mempercepat arus transportasi bagi masyarakat	Jalan perlu direkonstruksi	RT 2 RW 8 Dusun Jasem - Desa Dinoyo - Kecamatan Jatirejo - Kabupaten Mojokerto , Kab. Mojokerto, Jatirejo, Dinoyo
20/03/2023	CANDRA PAMBUDI, ST	Belum adanya TPT / Tembok Penahan Tanah di sepanjang jalan poros desa	Ekoriparian (Upaya pemulihan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS))	Dusun Sumbertanggul RT. 01 RW. 03, Kab. Mojokerto, Mojosari, Sumbertanggul
20/03/2023	POLRES MOJOKERTO	Kurangnya memadai Ruang Tunggu, ruang ujian teori, gudang penyimpanan arsip dan ruang pelayanan Polres Mojokerto.	Permohonan Hibah Lembaga (Polres Kabupaten Mojokerto)	JL. GAJAH MADA NO. 99 MOJOSARI MOJOKERTO , Kab. Mojokerto, Mojosari, Menanggal
20/03/2023	POLRES MOJOKERTO	Penggerusan tanah oleh air sungai yang dikhawatirkan terjadi longsor sebagian bangunan bangunan Polsek Pacet.	Usulan pembangunan aspirasi lembaga (Polres Kabupaten Mojokerto)	JALAN RAYA PACET KEC. PACET MOJOKERTO , Kab. Mojokerto, Pacet, Pacet

21/03/2023	Yasin Hidayat Kariyadi,SE	terjadi pendangkalan dialiran sungai dikarenakan tumpukan lumpur dan sampah juga banyak tembok penahan yang sudah rusak	Irigasi rusak	desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto, Gedeg, Ngareskidul
21/03/2023	SUTOYO	Kondisi Jembatan perlu perbaikan	Jembatan memerlukan pemeliharaan rutin	Dusun Sukorame RT 027 RW 008, Kab. Mojokerto, Jetis, Penompo
21/03/2023	Ir. PURWANTO	Pembuangan sampah yang tidak terkendali oleh masyarakat sehingga terjadi penumpukan sampah disaluran irigasi, sawah, dan pinggir sungai mas dan sungai brantas	sarana dan prasarana pengolahan sampah belum ada	Dusun Clangap RT 005 RW 006, Kab. Mojokerto, Jetis, Mlirip
21/03/2023	H.JUMA'IN	penyempitan dan pendangkalan sungai avur yang mengakibatkan banjir pada lahan pertanian dan perkebunan di desa ngabar.	Waduk/ Embung/ Sungai memerlukan pemeliharaan	Dusun Ngabar RT.023/006 Desa Ngabar kecamatan Jetis Kab. Mojokerto, Kab. Mojokerto, Jetis, Ngabar
22/03/2023	AKHMAD MUJIONO	Sarana pengelolaan sampah belum memadai	sarana dan prasarana pengolahan sampah belum ada	Dusun Urung-urung, Kab. Mojokerto, Trawas, Jatijejer
22/03/2023	H.Supardi	Waduk dangkal sehingga debit air untuk pertanian berkurang	Waduk/ Embung/ Sungai memerlukan pemeliharaan	Dusun Cendoro, Kab. Mojokerto, Dawarblondong, Cendoro

22/03/2023	Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto	Kurangnya infrastruktur pada Gedung dan Bangunan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, untuk mendukung tugas dan Fungsi Kejaksaan.	Permohonan Hibah Lembaga (Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto)	Jln. R.A. Basuni No.360 Sooko Kabupaten Mojokerto 61361, Kab. Mojokerto, Sooko, Japan
22/03/2023	H. Agus Siswahyudi,SE, SH	jalan rusak	Jalan memerlukan pemeliharaan rutin	dusun cinandang, Kab. Mojokerto, Dawarblondong, Cinandang
22/03/2023	H. Agus Siswahyudi,SE, SH	PETANI KEKURANGAN AIR	Waduk/ Embung/ Sungai memerlukan pemeliharaan	DUSUN CINANDANG, Kab. Mojokerto, Dawarblondong, Cinandang
22/03/2023	Khoirul Hadi	Poros Jalan PAKIS-DUKUHNGARJO RUSAK Berat	Jalan perlu direkonstruksi	Dusun Pakis Wetan Dan Dusun Bancang, Desa Pakis, Kab. Mojokerto, Trowulan, Pakis
23/03/2023	Didik Wudiarno	jalan poros rusak berat dari dusun mendek,dusun kutogirang, dusun krapyak sampai desa srigading	Jalan perlu direkonstruksi	desa kutogirang - desa srigading - 7.577276, 112.586768, Kab. Mojokerto, Ngoro, Kutogirang
27/03/2023	SPN POLDA JATIM	Permohonan bantuan hibah pembangunan jembatan akses ke TPA sampah dan pengaspalan jalan di Kesatrian SPN Polda Jatim	Permohonan Hibah Lembaga (Sekolah Polisi Negara Polda Jatim)	JL. RAYA BANGSAL - MOJOKERTO, Kab. Mojokerto, Bangsal, Puloniti

28/03/2023	Sri Asih	ANGGARAN TIDAK MENCUKUPI	Jaringan irigasi memerlukan rehabilitasi	DUSUN GELANG RT 1 RW 8 DESA MOJOSULUR KEC MOJOSARI MOJOKERTO, Kab. Mojokerto, Mojosari, Mojosulur
28/03/2023	Sri Asih	KEKURANGAN ANGGRAN	Jaringan irigasi memerlukan rehabilitasi	DUSUN GELANG RT RW 02/07, Kab. Mojokerto, Mojosari, Mojosulur
28/03/2023	Sri Asih	ANGGARAN KURANG MENCUKUPI	Jaringan irigasi memerlukan rehabilitasi	DUSUN MOJOSULUR RT RW 02 03 DESA MOJOSULUR KECAMATAN MOJOSARI, Kab. Mojokerto, Mojosari, Mojosulur
30/03/2023	JURIANTO BAMBANG S.	Masyarakat kekurangan air bersih	Debit air yang ada belum atau kurang mencukupi kebutuhan masyarakat	Dsn. Bantal, Kab. Mojokerto, Trawas, Duyung
09/04/2023	EDY PRABOWO	Sistem Drainase yang rusak meliputi penyumbatan dan kerusakan infrastruktur Trotoar dan Got sehingga menyebabkan banjir dan mobilitas pejalan kaki terganggu	Kerusakan dari sistem drainase yang ada	Jl. Raya Brangkal, Kedung Maling 3, Kedungmalin g, Kec. Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61361, Kab. Mojokerto, Sooko, Kedungmalin g
10/04/2023	H.JUMA'IN	Banyaknya sampah rumah tangga yang belum di kelola dengan baik dan mendapatkan nilai ekonomis	sarana dan prasarana pengolahan sampah belum ada	Dusun Pecuk Desa Ngabar, Kab. Mojokerto, Jetis, Ngabar

11/04/20 23	M. DEDI SETIAWAN, M.Pd.I	Belum Tersentuh Pembangunan	Pembangun an / Peningkatan dan Rehabilitasi Drainase (BK Desa - Umum)	Dusun Perning Rt 23 Rw 02 Desa Perning, Kab. Mojokerto, Jetis, Perning
11/04/20 23	Komari Arifin	-Jln Penghubung antar Ds. Bandung, Ds. Pagerjo & Ds. Jerukseger -Jln Pertanian	Fasilitas Peningkatan sarana dan Prasarana Desa bersama TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Dsn. Bandung Wetan RT/RW : 04/03, Kab. Mojokerto, Gedeg, Bandung

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 Prioritas Nasional, Prioritas ini sejalan dengan fokus pembangunan bagi industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi pendidikan dan keterampilan.

Pentingnya pendekatan kewilayahan untuk mencapai target pemulihan ekonomi pada 2024 sehingga setiap daerah perlu mengkaji potensi masing-masing wilayahnya yang dapat digali atau dioptimalkan. Pentingnya sinergi rencana pembangunan serta keseragaman arah kebijakan mulai dari pusat sampai dengan daerah agar tercipta keselarasan kinerja.

Tabel Sinergitas Prioritas Pembangunan

No.	Nasional	Jawa Timur	Kabupaten Mojokerto
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Pengembangan Ekonomi Wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya	Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan

	Berkualitas dan Berdaya Saing	Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan,	berdaya saing yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Pembangunan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup,	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik

Dari tabel sinergitas diatas, dapat kita telaah bahwasanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya memiliki keterkaitan terhadap prioritas pembangunan nasional yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang terjabarkan dalam prioritas kabupaten berupa Meningkatkan kualitas dan layanan dasar Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas melalui arah kebijakan Pembangunan infrastruktur.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berangkat dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, Tema Pembangunan “Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan SDM Inovatif, Kolaboratif, Kompeten dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan” dalam RKPD 2024, Tujuan dan Sasaran dalam RENSTRA 2021-2026 serta isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto merumuskan **Tujuan RENJA 2024** adalah **Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung** dengan Indikator Kinerja **Persentase Infrastruktur Kondisi Baik**. Sedangkan Sasaran dan Target RENJA 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	-2	(3)	(4)
1	Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	73,88%
2	Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100,00%
3	Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	88,82%
4	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	88,89%
5	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio kepatuhan PBG dan SLF	12,00%
6	Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	83,20%

7	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	30,53%
8	Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	100,00%
9	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai RB Perangkat Daerah	B
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A
		Rata - Rata Capaian indikator program :	90,44%
		1. Persentase panjang jaringan irigasi (Primer, Sekunder, Tersier) dalam kondisi baik . Target 78 %	
		2. Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten. Target 342.152 KK	
		3. Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R. Target 18%	
		4. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T. Target 283.955 Rumah	
		5. Persentase Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai . Target 18%	
		6. Rasio bangunan gedung instansi pemerintah yang laik fungsi. Target 90%	
7. Persentase bangunan gedung sesuai RTBL. Target 10%			

		8. Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik. Target 61%	
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	80,00%
		Indeks profesionalitas ASN	80
		Nilai LPPD Perangkat Daerah	3
10	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sejalan dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pencapaian tujuan dan sasaran kinerja renstra, serta berpedoman pada RPJMD 2021-2026 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto merumuskan 11 Program dan 20 Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah :

1. 1.03.01 **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** dengan 6 kegiatan yang terdiri atas :

1.1 1.03.01.2.01 **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan 3 sub kegiatan :

1.1.1 1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

1.1.2 1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

1.1.3 1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

1.2 1.03.01.2.02 **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan 1 sub kegiatan :

1.2.1 1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

1.3 1.03.01.2.03 **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** dengan 1 sub kegiatan :

1.3.1 1.03.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

1.4 1.03.01.2.06 **Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan 7 sub kegiatan :

1.4.1 1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

1.4.2 1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

1.4.3 1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

- 1.4.4 1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 1.4.5 1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 1.4.6 1.03.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material;
- 1.4.7 1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 1.5 1.03.01.2.08 **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan 2 sub kegiatan :
 - 1.5.1 1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 1.5.2 1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 1.6 1.03.01.2.09 **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan 6 sub kegiatan :
 - 1.6.1 1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 1.6.2 1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar;
 - 1.6.3 1.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel;
 - 1.6.4 1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 1.6.5 1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 1.6.6 1.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

2. 1.03.02 **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** dengan 2 kegiatan :

2.1 1.03.02.2.01 **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** dengan 3 sub kegiatan :

2.1.1 1.03.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya;

2.1.2 1.03.02.2.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya;

2.1.3 1.03.02.2.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota;

2.2 1.03.02.2.02 **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** dengan 5 sub kegiatan :

2.2.1 1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan;

2.2.2 1.03.02.2.02.09 Peningkatan Bendung Irigasi;

2.2.3 1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;

2.2.4 1.03.02.2.02.15 Rehabilitasi Bendung Irigasi;

2.2.5 1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan;

3. 1.03.03 **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** dengan 1 kegiatan :

- 3.1 1.03.03.2.01 **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** dengan 3 sub kegiatan :
- 3.1.1 1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM;
- 3.1.2 1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;
- 3.1.3 1.03.03.2.01.19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;
4. 1.03.04 **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** dengan 1 kegiatan :
- 4.1 1.03.04.2.01 **Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota** dengan 1 sub kegiatan :
- 4.1.1 1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA / TPST / SPA / TPS - 3R / TPS;
5. 1.03.05 **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** dengan 1 kegiatan :
- 5.1 1.03.05.2.01 **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** dengan 1 sub kegiatan :
- 5.1.1 1.03.05.2.01.01 1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat;
6. 1.03.06 **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** dengan 1 kegiatan :
- 6.1 1.03.06.2.01 **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung**

dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

dengan 3 sub kegiatan :

6.1.1 1.03.06.2.01.02 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan;

6.1.2 1.03.06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan;

6.1.3 1.03.06.2.01.13 Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan;

7. 1.03.08 **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**

dengan 1 kegiatan:

7.1 1.03.08.2.01 **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**, dengan 5 sub kegiatan :

7.1.1 1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG;

7.1.2 1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota;

7.1.3 1.03.08.2.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten / Kota;

7.1.4 1.03.08.2.01.09 Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan;

7.1.5 1.03.08.2.01.11 Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi;

8. 1.03.09 **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** dengan 1 kegiatan :

8.1 1.03.09.2.01 **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota** dengan 2 sub kegiatan :

8.1.1 1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten / Kota;

8.1.2 1.03.09.2.01.06 Monitoring Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan;

9. 1.03.10 **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** dengan 1 kegiatan :

9.1 1.03.10.2.01 **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** dengan 10 sub kegiatan :

9.1.1 1.03.10.2.01.03 Pengelolaan Leger Jalan

9.1.2 1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan / Jembatan;

9.1.3 1.03.10.2.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar;

9.1.4 1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan;

9.1.5 1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan;

9.1.6 1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan;

9.1.7 1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan;

9.1.8 1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan;

9.1.9 1.03.10.2.01.17 Pelebaran Jembatan;

9.1.10 1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan;

10. 1.03.11 **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** dengan 3 kegiatan :

10.1 1.03.11.2.01 **Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi** dengan 1 sub kegiatan :

10.1.1 1.03.11.2.01.06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi;

10.2 1.03.11.2.02 **Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** dengan 1 sub kegiatan :

10.2.1 1.03.11.2.02.01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi;

10.3 1.03.11.2.04 **Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi** dengan 2 sub kegiatan :

10.3.1 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi;

10.3.2 1.03.11.2.04.03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi;

11. 1.03.12 **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** dengan 3 kegiatan :

11.1 1.03.12.2.01 **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota** dengan 1 sub kegiatan :

11.1.1 1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota;

11.2 1.03.12.2.03 **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota** dengan 1 sub kegiatan :

11.2.1 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah;

11.3 1.03.12.2.04 **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** dengan 1 sub kegiatan :

11.3.1 11.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan beserta indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja, kebutuhan dana dan sumber pendanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

NAMA PD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase target Kinerja OPD yang terpenuhi	Kab. Mojokerto	100%	26.883.684.000	DAU			
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersusun	Kab. Mojokerto	100%	380.000.000	DAU			
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	6 dokumen	15.000.000	DAU			

1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mojokerto	30 Laporan	350.000.000	DAU			
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	6 Laporan	15.000.000	DAU			
1.03.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN terbayar gaji dan tunjangannya	Kab. Mojokerto	100%	22.809.784.000	DAU			
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	218 Orang/bulan	22.809.784.000	DAU			
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset OPD yang tercatat dan dilaporkan	Kab. Mojokerto	100%	50.000.000	DAU			
1.03.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Mojokerto	1 Dokumen	50.000.000	DAU			
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksana	Kab. Mojokerto	100%	796.400.000	DAU			
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Mojokerto	1 paket	36.900.000	DAU			
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	1 paket	125.000.000	DAU			

1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	1 paket	94.500.000	DAU			
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Mojokerto	1 paket	90.000.000	DAU			
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Mojokerto	20 Dokumen	50.000.000	DAU			
1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Mojokerto	1 paket	150.000.000	DAU			
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	600 Laporan	250.000.000	DAU			
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Mojokerto	100%	1.880.000.000	DAU			
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Mojokerto	12 Laporan	280.000.000	DAU			
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	12 Laporan	1.600.000.000	DAU			
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara	Kab. Mojokerto	87%	967.500.000	DAU			

1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Mojokerto	50 unit	299.500.000	DAU			
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kab. Mojokerto	35 unit	300.000.000	DAU			
1.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Kab. Mojokerto	30 unit	15.000.000	DAU			
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Mojokerto	12 unit	128.000.000	DAU			
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Mojokerto	4 unit	150.000.000	DAU			
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Mojokerto	200 unit	75.000.000	DAU			
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi (Primer, Sekunder, Tersier) dalam kondisi baik	Kab. Mojokerto	78%	21.232.227.178	DAK/DAU			
1.03.02.2.01	<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase SDA terkelola</i>	Kab. Mojokerto	82%	670.000.000	DAU			

1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Kab. Mojokerto	1 Dokumen	120.000.000	DAU			
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Mojokerto	3 unit	400.000.000	DAU			
1.03.02.2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Mojokerto	1 Dokumen	150.000.000	DAU			
1.03.02.2.02	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase jaringan irigasi yang dikelola (dipelihara/direhabilitasi) dari total jaringan irigasi kewenangan</i>	Kab. Mojokerto	75%	20.562.227.178	DAK/DAU			
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Kab. Mojokerto		1.827.648.575	DAK/DAU			
1.03.02.2.02.09	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang ditingkatkan	Kab. Mojokerto	2 bendung	938.588.313	DAU			

1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kab. Mojokerto	5,1 Km	3.857.688.409	DAK/DAU			
1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung irigasi yang direhabilitasi	Kab. Mojokerto	9 bendung	9.438.301.882	DAK/DAU			
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Mojokerto		4.500.000.000	DAU			
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten	Kab. Mojokerto	342,152 KK	9.827.875.190	DAU/DAK			
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui kegiatan penyediaan SPAM	Kab. Mojokerto	1.400 KK	9.827.875.190	DAU/DAK			
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Kab. Mojokerto	5 Dokumen	550.000.000	DAU			
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Kab. Mojokerto	0 SR	-				

1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah tangga terlayani SPAM (SR)	Kab. Mojokerto	350 SR	2.779.893.700	DAU/DAK			
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah tangga terlayani SPAM (SR)	Kab. Mojokerto	1050 SR	6.497.981.490	DAU/DAK			
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	Kab. Mojokerto	18%	4.620.000.000	DAU/DAK			
1.03.04.2.01	<i>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah desa yang disediakan TPS/TPST/TPS3R</i>	Kab. Mojokerto	7 Desa	4.620.000.000	DAU/DAK			
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Mojokerto	1750 Rumah Tangga	4.620.000.000	DAU/DAK			
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	Kab. Mojokerto	283.955 rumah	4.236.801.300	DAU/DAK			
1.03.05.2.01	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar</i>	Kab. Mojokerto	32%	4.236.801.300	DAU/DAK			

1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Mojokerto	0 Dokumen	-	DAU			
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Kab. Mojokerto	394 Rumah Tangga	4.236.801.300	DAU/DAK			
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	Kab. Mojokerto	18%	10.451.716.000	DAU			
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	Kab. Mojokerto	3.242 m	10.451.716.000	DAU			
1.03.06.2.01.02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang disusun	Kab. Mojokerto	2 Dokumen	440.000.000	DAU			
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Kab. Mojokerto	1615 m	5.008.859.000	DAU			
1.03.06.2.01.13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Kab. Mojokerto	1527 m	5.002.857.000	DAU			
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan gedung instansi pemerintah yang laik fungsi	Kab. Mojokerto		19.100.000.000	DAU			

1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung instansi pemerintah kondisi baik	Kab. Mojokerto	96%	19.100.000.000	DAU			
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kab. Mojokerto	1 Dokumen	350.000.000	DAU			
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	10 Dokumen	18.550.000.000	DAU			
1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah konsultasi bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara daerah kabupaten/kota	Kab. Mojokerto	1 Dokumen	50.000.000	DAU			
1.03.08.2.01.09	Penilikan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh penilik bangunan	Jumlah bangunan gedung yang telah dilakukan penilikan oleh penilik bangunan	Kab. Mojokerto	25 unit	100.000.000	DAU			

1.03.08.2.01.11	Pemeriksaan kelaikan fungsi rumah tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka penerbitan sertifikat laik fungsi	Jumlah rumah tinggal tunggal dan rumah deret yang telah dilakukan pemeriksaan kelaikan fungsi	Kab. Mojokerto	50 unit	50.000.000	DAU			
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Gedung sesuai RTBL	Kab. Mojokerto	10%	335.000.000	DAU			
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengajuan dan Survey Lokasi Sempadan Jalan	Kab. Mojokerto	35 Pengajuan	335.000.000	DAU			
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	1 Dokumen	185.000.000	DAU			
1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Mojokerto	1 Dokumen	150.000.000	DAU			
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	Kab. Mojokerto	61%	400.987.775.556	DAU			
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik	Kab. Mojokerto	635 km	400.987.775.556	DAU			
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Kab. Mojokerto	1 Dokumen	135.000.000	DAU			
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Mojokerto	1 Dokumen	100.000.000	DAU			

1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	Kab. Mojokerto	46,667 km	171.065.233.496	DAU/DID			
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Kab. Mojokerto	15,174 km	57.609.117.325	DAU/DID			
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kab. Mojokerto	1,46359 km	6.850.000.000	DAU/DID			
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala		35,893 km	78.581.169.338	DAU/DID			
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Kab. Mojokerto	30 km	20.000.000.000	DAU			
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Kab. Mojokerto	266,5 m	63.957.002.125	DAU/DID			
1.03.10.2.01.17	Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan pelebaran	Kab. Mojokerto	8,5 m	906.775.000	DAU			
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Kab. Mojokerto	300 m	1.783.478.272	DAU			
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Badan Usaha yang Memiliki Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat Terampil	Kab. Mojokerto	8%	880.000.000	DAU			
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih	Kab. Mojokerto	100%	400.000.000	DAU			
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Kab. Mojokerto	50 orang	400.000.000	DAU			

1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Informasi jasa konstruksi	Kab. Mojokerto	10 Informasi	100.000.000	DAU			
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Mojokerto	10 Laporan	100.000.000	DAU			
1.03.11.2.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Kab. Mojokerto	0 Orang	-	DAU			
1.03.11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Kab. Mojokerto	0 Dokumen	-	DAU			
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase ketertiban usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Kab. Mojokerto	65%	380.000.000	DAU			
1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Mojokerto	100 Orang	280.000.000	DAU			
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Mojokerto	10 Laporan	100.000.000	DAU			

1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pembangunan/peningka tan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	Kab. Mojokert o	100%	1.451.785.500	DAU			
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen tata ruang yang tersusun	Kab. Mojokert o	100%	951.785.500	DAU			
1.03.12.2.01. 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Mojokert o	1 Dokumen	951.785.500	DAU			
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permintaan informasi tata ruang yang tertangani	Kab. Mojokert o	100%	150.000.000	DAU			
1.03.12.2.03. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kab. Mojokert o	1 Dokumen	150.000.000	DAU			
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan ruang daerah sesuai rencana tata ruang	Kab. Mojokert o	100%	350.000.000	DAU			
1.03.12.2.04. 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Mojokert o	1 Dokumen	350.000.000	DAU			

JUMLAH TOTAL	500.006.864.724	DAU/DAK/DI D			
--------------	-----------------	-----------------	--	--	--

BAB IV
RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 yang memuat Program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan targetnya, lokasi, dan Pagu Indikatif/Kebutuhan Pendanaannya tertuang dalam tabel berikut ini :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.03.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase target Kinerja OPD yang terpenuhi	Kab. Mojokerto	100%	26.883.684.000	DAU
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersusun	Kab. Mojokerto	100%	380.000.000	DAU
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	6 dokumen	15.000.000	DAU
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kab. Mojokerto	30 Laporan	350.000.000	DAU

		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
1.03.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	6 Laporan	15.000.000	DAU
1.03.1. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN terbayar gaji dan tunjangan	Kab. Mojokerto	100%	22.809.784.000	DAU
1.03.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	218 Orang /bulan	22.809.784.000	DAU
1.03.01 .2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset OPD yang tercatat dan dilaporkan	Kab. Mojokerto	100%	50.000.000	DAU
1.03.01. 2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Mojokerto	1 Dokumen	50.000.000	DAU
1.03.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksana	Kab. Mojokerto	100%	796.400.000	DAU
1.03.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Mojokerto	1 paket	36.900.000	DAU
1.03.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	1 paket	125.000.000	DAU
1.03.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	1 paket	94.500.000	DAU
1.03.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Mojokerto	1 paket	90.000.000	DAU
1.03.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Mojokerto	20 Dokumen	50.000.000	DAU

1.03.01. 2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Mojo kerto	1 paket	150.000.000	DAU
1.03.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojo kerto	600 Laporan	250.000.000	DAU
1.03.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Mojo kerto	100%	1.880.000.000	DAU
1.03.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Mojo kerto	12 Laporan	280.000.000	DAU
1.03.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Mojo kerto	12 Laporan	1.600.000.000	DAU
1.03.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara	Kab. Mojo kerto	87%	967.500.000	DAU
1.03.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Mojo kerto	50 unit	299.500.000	DAU
1.03.01. 2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kab. Mojo kerto	35 unit	300.000.000	DAU
1.03.01. 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Kab. Mojo kerto	30 unit	15.000.000	DAU
1.03.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan	Kab. Mojo kerto	12 unit	128.000.000	DAU

		Mesin Lainnya yang Dipelihara				
1.03.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Mojokerto	4 unit	150.000.000	DAU
1.03.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Mojokerto	200 unit	75.000.000	DAU
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi (Primer, Sekunder, Tersier) dalam kondisi baik	Kab. Mojokerto	78%	21.232.227.178	DAK/DAU
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDA terkelola	Kab. Mojokerto	82%	670.000.000	DAU
1.03.02. 2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Kab. Mojokerto	1 Dokumen	120.000.000	DAU
1.03.02. 2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Mojokerto	3 unit	400.000.000	DAU
1.03.02. 2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Mojokerto	1 Dokumen	150.000.000	DAU

1.03.02 .2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase jaringan irigasi yang dikelola (dipelihara/direhabilitasi) dari total jaringan irigasi kewenangan	Kab. Mojo kerto	75%	20.562.227.178	DAK/D AU
1.03.02. 2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Kab. Mojo kerto		1.827.648.575	DAK/D AU
1.03.02. 2.02.09	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang ditingkatkan	Kab. Mojo kerto	2 bendung	938.588.313	DAU
1.03.02. 2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kab. Mojo kerto	5,1 Km	3.857.688.409	DAK/D AU
1.03.02. 2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung irigasi yang direhabilitasi	Kab. Mojo kerto	9 bendung	9.438.301.882	DAK/D AU
1.03.02. 2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Mojo kerto		4.500.000.000	DAU
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten	Kab. Mojo kerto	342,152 KK	9.827.875.190	DAU/D AK
1.03.03 .2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui kegiatan penyediaan SPAM	Kab. Mojo kerto	1.400 KK	9.827.875.190	DAU/D AK

1.03.03. 2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Kab. Mojo kerto	5 Doku men	550.000.000	DAU
1.03.03. 2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Kab. Mojo kerto	0 SR	-	
1.03.03. 2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah tangga terlayani SPAM (SR)	Kab. Mojo kerto	350 SR	2.779.893.700	DAU/D AK
1.03.03. 2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah tangga terlayani SPAM (SR)	Kab. Mojo kerto	1050 SR	6.497.981.490	DAU/D AK
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	Kab. Mojo kerto	18%	4.620.000.000	DAU/D AK
1.03.04 .2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang disediakan TPS/TPST/TPS3R	Kab. Mojo kerto	7 Desa	4.620.000.000	DAU/D AK
1.03.04. 2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Mojo kerto	1750 Rumah Tangga	4.620.000.000	DAU/D AK
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	Kab. Mojo kerto	283.955 rumah	4.236.801.300	DAU/D AK
1.03.05 .2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Kab. Mojo kerto	32%	4.236.801.300	DAU/D AK

	Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Mojokerto	0 Dokumen	-	DAU
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Kab. Mojokerto	394 Rumah Tangga	4.236.801.300	DAU/D AK
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	Kab. Mojokerto	18%	10.451.716.000	DAU
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	Kab. Mojokerto	3.242 m	10.451.716.000	DAU
1.03.06.2.01.02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang disusun	Kab. Mojokerto	2 Dokumen	440.000.000	DAU
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Kab. Mojokerto	1615 m	5.008.859.000	DAU
1.03.06.2.01.13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Kab. Mojokerto	1527 m	5.002.857.000	DAU
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan gedung instansi pemerintah yang laik fungsi	Kab. Mojokerto		19.100.000.000	DAU
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian	Persentase bangunan gedung instansi pemerintah kondisi baik	Kab. Mojokerto	96%	19.100.000.000	DAU

	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					
1.03.08. 2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraa n Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kab. Mojokerto	1 Dokumen	350.000.000	DAU
1.03.08. 2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	10 Dokumen	18.550.000.000	DAU
1.03.08. 2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah konsultasi bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara daerah kabupaten/kota	Kab. Mojokerto	1 Dokumen	50.000.000	DAU
1.03.08. 2.01.09	Penilikan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh penilik bangunan	Jumlah bangunan gedung yang telah dilakukan penilikan oleh penilik bangunan	Kab. Mojokerto	25 unit	100.000.000	DAU
1.03.08. 2.01.11	Pemeriksaan kelaikan fungsi rumah tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka penerbitan sertifikat laik fungsi	Jumlah rumah tinggal tunggal dan rumah deret yang telah dilakukan pemeriksaan kelaikan fungsi	Kab. Mojokerto	50 unit	50.000.000	DAU
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN YA	Persentase Bangunan Gedung sesuai RTBL	Kab. Mojokerto	10%	335.000.000	DAU

1.03.09. 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengajuan dan Survey Lokasi Sempadan Jalan	Kab. Mojo kerto	35 Pengajuan	335.000.000	DAU
1.03.09. 2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Kab. Mojo kerto	1 Dokumen	185.000.000	DAU
1.03.09. 2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Mojo kerto	1 Dokumen	150.000.000	DAU
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	Kab. Mojo kerto	61%	400.987.775.556	DAU
1.03.10. 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik	Kab. Mojo kerto	635 km	400.987.775.556	DAU
1.03.10. 2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Kab. Mojo kerto	1 Dokumen	135.000.000	DAU
1.03.10. 2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Mojo kerto	1 Dokumen	100.000.000	DAU
1.03.10. 2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	Kab. Mojo kerto	46,667 km	171.065.233.496	DAU/DID
1.03.10. 2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Kab. Mojo kerto	15,174 km	57.609.117.325	DAU/DID
1.03.10. 2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kab. Mojo kerto	1,46359 km	6.850.000.000	DAU/DID
1.03.10. 2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala		35,893 km	78.581.169.338	DAU/DID
1.03.10. 2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Kab. Mojo kerto	30 km	20.000.000.000	DAU
1.03.10. 2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Kab. Mojo kerto	266,5 m	63.957.002.125	DAU/DID

1.03.10. 2.01.17	Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan pelebaran	Kab. Mojo kerto	8,5 m	906.775.000	DAU
1.03.10. 2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Kab. Mojo kerto	300 m	1.783.478.272	DAU
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Badan Usaha yang Memiliki Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat Terampil	Kab. Mojo kerto	8%	880.000.000	DAU
1.03.11 .2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih	Kab. Mojo kerto	100%	400.000.000	DAU
1.03.11. 2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Kab. Mojo kerto	50 orang	400.000.000	DAU
1.03.11 .2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Informasi jasa konstruksi	Kab. Mojo kerto	10 Informasi	100.000.000	DAU
1.03.11. 2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Mojo kerto	10 Laporan	100.000.000	DAU
1.03.11. 2.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Kab. Mojo kerto	0 Orang	-	DAU
1.03.11. 2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Kab. Mojo kerto	0 Dokumen	-	DAU
1.03.11 .2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase ketertiban usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Kab. Mojo kerto	65%	380.000.000	DAU

1.03.11. 2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Mojo kerto	100 Orang	280.000.000	DAU
1.03.11. 2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Mojo kerto	10 Laporan	100.000.000	DAU
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pembangunan/ peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	Kab. Mojo kerto	100%	1.451.785.500	DAU
1.03.12 .2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kot a	Persentase dokumen tata ruang yang tersusun	Kab. Mojo kerto	100%	951.785.500	DAU
1.03.12. 2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Mojo kerto	1 Dokumen	951.785.500	DAU
1.03.12 .2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase permintaan informasi tata ruang yang tertangani	Kab. Mojo kerto	100%	150.000.000	DAU
1.03.12. 2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kab. Mojo kerto	1 Dokumen	150.000.000	DAU

1.03.12 .2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan ruang daerah sesuai rencana tata ruang	Kab. Mojokerto	100%	350.000.000	DAU
1.03.12. 2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Mojokerto	1 Dokumen	350.000.000	DAU
JUMLAH TOTAL					500.006.864.724	DAU/D AK/DID

**MATRIKS RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024**

N O.	Sub Kegiatan	Rincian	LOKASI DESA - KECAMATAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2024	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	2	2	6	3	4	5
1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Operasional penyusunan dokumen Renja, Renstra dll	Kab. Mojokerto	15.000.000	DAU	
1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Honorarium narasumber pendampingan pelaksanaan, kepolisian dan BPKP (kondisional). Untuk pendampingan per paket pekerjaan 2-3x kelapangan, 3-4org, 3-4jam. Kemudian pendampingan SKK TGR dengan pelaksanaan sebanyak 10 bulan + operasional mamin	Kab. Mojokerto	350.000.000	DAU	
1.1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Operasional penyusunan dokumen LPPD, Sakip dll	Kab. Mojokerto	15.000.000	DAU	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	22.809.784.000	DAU	
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pendataan dan pemetaan tanah stren, sosialisasi pemanfaatan aset dengan narasumber dari pelaksanaan, penertiban aset barang dan kendaraan operasional, mamin	Kab. Mojokerto	50.000.000	DAU	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Penyediaan peralatan dan material listrik untuk kantor utama dan 5 UPTD	Kab. Mojokerto	36.900.000	DAU	

	Bangunan Kantor					
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan kantor, kursi staf, TV+stand untuk paparan, printer, penghancur kertas, mesin fotocopy	Kab. Mojokerto	125.000.000	DAU	
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan mamin rapat dan mamin tamu	Kab. Mojokerto	94.500.000	DAU	
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan cetak, form sppd, amplop, map, kertas kop	Kab. Mojokerto	90.000.000	DAU	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Untuk langganan koran selama 12 bulan, cetak/fotocopy peraturan2 untuk dibagikan kebidang2	Kab. Mojokerto	50.000.000	DAU	
1.4.5	Penyediaan Bahan/Material	Untuk pembelian ATK, peralatan komputer, tinta dsb	Kab. Mojokerto	150.000.000	DAU	
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Untuk sppd intern, dan permohonan tambahan untuk sppd UPTD 2jt x 5 uptd x 10 bln	Kab. Mojokerto	250.000.000	DAU	
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Untuk pembayaran listrik, air dan internet kantor utama + 5 UPTD	Kab. Mojokerto	280.000.000	DAU	
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	untuk gaji Non ASN 76 orang x 1.557.000	Kab. Mojokerto	1.600.000.000	DAU	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Untuk biaya pemeliharaan kendaraan, BBM, suku cadang, dan pembayaran pajak kendaraan	Kab. Mojokerto	299.500.000	DAU	

	Operasional atau Lapangan	termasuk pajak truck dll				
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Untuk pemeliharaan dan suku cadang alat berat	Kab. Mojokerto	300.000.000	DAU	
1.6.2	Pemeliharaan Mebel	untuk pemeliharaan kursi, meja dll	Kab. Mojokerto	15.000.000	DAU	
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	untuk pemeliharaan peralatan laboratorium, pembelian bahan operasional dan kalibrasi alat	Kab. Mojokerto	128.000.000	DAU	
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Untuk pemeliharaan ringan/rutin gedung kantor pusat + 5 uptd	Kab. Mojokerto	150.000.000	DAU	
1.6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Untuk pemeliharaan peralatan kantor, AC, komputer, printer, mesin fotocopy	Kab. Mojokerto	75.000.000	DAU	
2.1.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	E-PAKSI untuk penilaian Kinerja Irigasi pendukung sasaran RPJMD dan pengusulan DAK	Kab. Mojokerto	120.000.000	DAU	
2.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Penyediaan BBM untuk operasi dan Pemeliharaan Embung	Kab. Mojokerto	400.000.000	DAU	
2.1.3	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan	1. Pelayanan perijinan pemanfaatan aset SDA, 2. Potensi PAD	Kab. Mojokerto	150.000.000	DAU	

	Kabupaten/Kota					
2.2.1	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Bendet	Desa Candiwa tu Kec. Pacet (Wilayah UPTD PUGERAN)	622.123.000	DAK/DAU	(Kemungkinan dialihkan ke APBD)
		Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kemiri Bawah	Desa Kemiri Kec. Pacet (Wilayah UPTD PUGERAN)	1.007.487.000	DAK/DAU	(Kemungkinan dialihkan ke APBD)
		Penunjang DAK (APBD)	Kab. Mojokerto	99.019.288	DAU	
		Penunjang DAK (APBN)	Kab. Mojokerto	99.019.288	DAK	
2.2.2	Peningkatan Bendung Irigasi	Peningkatan Bendung Sudimoro Desa Pungging Kec. Pungging	Desa Pungging Kec. Pungging	938.588.313	DAU	
2.2.3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi D.I. Mantung	Wilayah UPTD PANDAN	866.389.212	DAU	
		Rehabilitasi D.I. Kanigoro	Wilayah UPTD SUMEN GKO	649.791.909	DAU	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lebak Sumengko	Wilayah UPTD SUMEN GKO	1.025.488.000	DAK	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Janjing	Wilayah UPTD PANDAN	500.000.000	DAU	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pudaksari	SPN	217.000.000	DAU	Usulan Polres
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mojosulur	Wilayah UPTD Mojosari	500.000.000	DAU	Pokir
		Penunjang DAK (APBD)	Kab. Mojokerto	49.509.644	DAU	

		Penunjang DAK (APBN)	Kab. Mojokerto	49.509.644	DAK	
2.2.4	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Rehabilitasi Bendung Trimo	Wilayah UPTD PUGERAN	938.588.313	DAU	
		Rehabilitasi Bendung Wonokerto	Wilayah UPTD PANDAN	1.371.782.919	DAU	
		Rehabilitasi Bendung Kemloko	Wilayah UPTD BANGSAL	866.389.212	DAU	
		Rehabilitasi Bendung Mojogeneng	Wilayah UPTD PUGERAN	1.351.221.000	DAK	
		Rehabilitasi Bendung Ngungkung	Wilayah UPTD PANDAN	986.493.000	DAK	
		Rehabilitasi Bendung Bringin	Wilayah UPTD PANDAN	788.119.000	DAK	
		Rehabilitasi Bendung Mojolegi	Wilayah UPTD BANGSAL	1.378.212.000	DAK	
		Rehabilitasi Bendung Tempuran	Wilayah UPTD PANDAN	762.400.000	DAK	
		Rehabilitasi Bendung Cakarayam	Wilayah UPTD SUMENGGKO	500.000.000	DAU	
		Penunjang DAK (APBD)	Kab. Mojokerto	247.548.219	DAU	
		Penunjang DAK (APBN)	Kab. Mojokerto	247.548.219	DAK	
2.2.5	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1. Supporting Pengendalian Banjir di Kabupaten Mojokerto, 2. Pengadaan Bahan Banjiran 3. Pencapaian IKK Outcome LPPD (Rasio Luas DI yang terlayani JI), 3. Permasalahan jumlah	Kab. Mojokerto	4.500.000.000	DAU	

		pekerja irigasi yang minim				
3.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Penyusunan Database SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Kec. Kutorejo	Kab. Mojokerto	110.000.000	DAU	
		Penyusunan Database SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Kec. Ngoro	Kab. Mojokerto	110.000.000	DAU	
		Penyusunan Database SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Kec. Pungging	Kab. Mojokerto	110.000.000	DAU	
		Penyusunan Database SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Kec. Dawarblondong	Kab. Mojokerto	110.000.000	DAU	
		Penyusunan Database SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Kec. Kemlagi	Kab. Mojokerto	110.000.000	DAU	
3.1.3	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Duyung	Kec. Trawas	880.000.000	DAU/DAK	

		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Jatijejer	Kec. Trawas	880.000.000	DAK	
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Purworejo	Kec. Pungging	843.893.700	DAU	
		Penunjang Peningkatan SPAM	Kab. Mojokerto	176.000.000	DAU	
3.1.4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Penanggungan	Kec. Trawas	843.893.700	DAK	
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Mojokembang	Kec. Pacet	843.893.700	DAK	
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Padusan	Kec. Pacet	843.893.700	DAK	
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Bleberan	Kec. Jatirejo	843.893.700	DAK	
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Dukuhngarjo	Kec. Jatirejo	1.125.191.600	DAK	
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Sukoanyar	Kec. Ngoro	843.893.700	DAK	

		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Watesnegoro	Kec. Ngoro	562.595.800	DAK	
		Penunjang Perluasan SPAM	Kab. Mojokerto	590.725.590	DAU	
4.1.1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Pembangunan TPS-3R Desa Kesiman	Kecamatan Trawas	600.000.000	DAK	
		Pembangunan TPS-3R Desa Pohjejer	Kecamatan Gondang	600.000.000	DAK	
		Pembangunan TPS-3R Desa Dlanggu	Kecamatan Dlanggu	600.000.000	DAK	
		Pembangunan TPS-3R Desa Sidorejo	Kecamatan Jetis	600.000.000	DAK	
		Pembangunan TPS-3R Desa Lengkong	Kec. Mojoanyar	600.000.000	DAK	
		Pembangunan TPS-3R Desa Ngimbangan	Kec. Mojosari	600.000.000	DAK	
		Pembangunan TPS-3R Desa Sumberwuluh	Kec. Mojosari	600.000.000	DAK	
		Penunjang Pembangunan TPS-3R	Kab. Mojokerto	420.000.000	DAU	
5.1.1	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Desa Gading	Kec. Jatirejo	751.973.000	DAK	
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Desa Tawangrejo	Kec. Jatirejo	515.050.000	DAK	
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Desa Jatirejo	Kec. Jatirejo	721.070.000	DAK	
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Desa Gunungsari	Kec. Dawarbandong	515.050.000	DAK	

		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Desa Dawarblandong	Kec. Dawarblandong	515.050.000	DAK	
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Desa Brayublandong	Kec. Dawarblandong	515.050.000	DAK	
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Desa Mojosarirejo	Kec. Kemlagi	350.234.000	DAU	
		Penunjang Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kab. Mojokerto	353.324.300	DAU	
6.1.1	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan Kecamatan Puri	Kab. Mojokerto	240.000.000	DAU	- Identifikasi kawasan genangan vital - Identifikasi saluran buangan dan kondisi eksisting - Rencana penanganan kawasan genangan vital
		Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan Kecamatan Kemlagi	Kab. Mojokerto	200.000.000	DAU	- Identifikasi kawasan genangan vital - Identifikasi saluran buangan dan kondisi eksisting - Rencana penanganan kawasan genangan vital

6.1.2	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Desa Puri	Kecamatan Puri	795.214.000	DAU	- Paket P.APBD TA 2022 yang gagal tender - Usulan dan pernyataan dari desa sudah ada Output : - Mengurangi genangan di depan KUD - Lokasi di Ruas Jln Brangkal - Badung (Dusun Tegalsari Desa Puri)
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Desa Modongan	Kecamatan Sooko	801.569.000	DAU	
		Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Desa Mojokumpul	Kecamatan Kemlagi	2.169.341.000	DAU	
		Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Desa Brangkal	Kecamatan Sooko	1.242.735.000	DAU	
6.1.3	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Desa Ketapanrame	Kecamatan Trawas	1.777.908.000	DAU	
		Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Desa Trowulan	Kecamatan Trowulan	830.658.000	DAU	
		Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan Desa Sooko	Kecamatan Sooko	2.394.291.000	DAU	

7.1.1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Honor TPA, Tim Sekretariat PBG SLF, Pembuatan Plakat dan Mamin	Kab. Mojokerto	350.000.000	DAU	
7.1.2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Aula Kejaksaan Negeri Kab.Mojokerto	Kab. Mojokerto	5.000.000.000	DAU	Hibah
		Pembangunan Gedung Lantas Polres Kab.Mojokerto	Kab. Mojokerto	4.500.000.000	DAU	Hibah
		Pembangunan Polsek Gedeg	Kab. Mojokerto	2.500.000.000	DAU	Tanah Aset Pemda
		Rehabilitasi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Mojokerto	Kab. Mojokerto	1.500.000.000	DAU	Halaman kantor PU dan Drainase
		Pembangunan Gudang Material dan Peralatan DPUPR Kab. Mojokerto	Kab. Mojokerto	1.500.000.000	DAU	Lokasi di RBU / ex. UPT Brangkal
		Pembangunan Kantor Kelurahan Sawahan	Kab. Mojokerto	1.000.000.000	DAU	Pembangunan Kantor dan Pendopo di Lokasi Baru
		Rehabilitasi Kantor Kelurahan Sarirejo	Kab. Mojokerto	500.000.000	DAU	
		Rehabilitasi Kantor Kelurahan Kauman	Kab. Mojokerto	800.000.000	DAU	

		Rehabilitasi Kantor UPT Gedeg	Ka b. Mojokerto	500.000.000	DAU	
		Rehabilitasi Kantor UPT Bangsal	Ka b. Mojokerto	750.000.000	DAU	
7.1.3	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Operasional bantuan teknis perangkat daerah yang membutuhkan pendampingan teknis terkait bangunan gedung	Kab. Mojokerto	50.000.000	DAU	
7.1.4	Penilikan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh penilik bangunan	Penilikan PBG (setiap objek dilaksanakan 3 kali), cek kebutuhan untuk 1 tahun	Kab. Mojokerto	100.000.000	DAU	
7.1.5	Pemeriksaan kelaikan fungsi rumah tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka penerbitan sertifikat laik fungsi	Dari hasil pengecekan untuk Sub Kegiatan yang lebih cocok untuk SLF Bangunan, ternyata belum diakomodir dalam kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Kab. Mojokerto	50.000.000	DAU	
8.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Operasional Tim Survey Site Plan	Ka b. Mojokerto	35.000.000	DAU	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Ka b. Mojokerto	150.000.000	DAU	Kolaborasi dengan bidang penataan ruang
8.1.2	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Pendataan Kelaikan Bangunan Gedung Negara di Kec. Pungging	Ka b. Mojokerto	150.000.000	DAU	Pendataan Kelayakan Bangunan Gedung Negara

9.1.1	Pengelolaan Leger Jalan	Kajian Sempadan Jalan untuk memperbaiki perbup tahun 2012 tentang sempadan jalan, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini + biaya operasional	Kab. Mojokerto	135.000.000	DAU	
9.1.2	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Untuk DAK dan kebutuhan pengukuran capaian kinerja kemantapan jalan setiap tahun	Kab. Mojokerto	100.000.000	DAU	
9.1.3	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Ruas Jalan Banjaragung - Sawo	Desa Puri Kec. Puri	5.477.340.800	DAU	Musren Kecamatan
			Desa Kenanten Kec. Puri			
		Ruas Jalan Temuireng - Jetis	Desa Sidorejo Kec. Jetis	2.688.140.000	DAU	PU (P1)
		Ruas Jalan Pasinan - Pohkecik	Desa Jrambe Kec. Dlanggu	1.743.136.000	DAU	PU (P1)
		Ruas Jalan Rembu Kidul - Semampir Kidul	Desa Japanan Kec. Kemlagi	5.878.010.000	DAU	Musren Kecamatan
		Ruas Jalan Teratai - Japan	Desa Sooko Kec. Sooko	1.551.260.810	DAU	Pokir
		Ruas Jalan Sekargadung - Purwojati	Desa Sekargadung Kec. Punggiling	4.735.887.500	DAU	Musren Kecamatan
		Ruas Jalan Ketapanrame - Dlundung	Desa Ketapanrame Kec. Trawas	5.878.010.000	DAU	PU (P1)
		Ruas Jalan Jiyu - Jiyu	Desa Jiyu Kec. Kutorejo	3.973.610.000	DAU	Pokir
		Ruas Jalan Bendung - Bantengan	Desa Bendung Kec. Jetis	1.475.012.604	DAU	PU (P1)

		Ruas Jalan Jatidukuh - Ngembat	Desa Ngembat Kec. Gondang	3.544.499.000	DAU	kondisi rusak berat, kelanjutan, dan program ibu bupati
		Ruas Jalan Bulakunci - Bendunganjati	Desa Nogosari Kec. Pacet	4.101.950.000	DAU	kondisi rusak parah dan akses utama masyarakat dan program ibu bupati
		Ruas Jalan Ngembah - Mojokarang	Desa Mojokarang Kec. Dlanggu	5.418.153.290	DAU	kondisi rusak berat, kelanjutan, dan program ibu bupati (Musren Kecamatan)
		Ruas Jalan Ngastemi - Kepuhpandak	Desa Karangasem Kec. Kutorejo	3.500.000.000	DAU	kelanjutan (PU (P1))
		Ruas Jalan Legundi - Rejosari	Desa Plosobleberan Kec. Jatirejo	5.532.148.190	DAU	kondisi rusak berat, kelanjutan (PU (P1))
		Ruas Jalan Banjarsari - Japanan	Desa Banjarsari Kec. Jetis	5.539.306.250	DAU	kelanjutan (PU (P1))
		Ruas Jalan Gebangmalang - Sumberjati	Desa Sumberjati Kec. Mojoanyar	3.485.193.500	DAU	kelanjutan (Musren Kecamatan)
		Ruas Jalan Pakis - Dukuhngarjo	Desa Pakis Kec. Trowulan	3.765.000.000	DAU	Penuntasan (Musren Kecamatan)
		Ruas Jalan Wonoploso - Begaganlimo	Desa Kalikatir Kec. Gondang	2.817.690.950	DAU	kelanjutan, penuntasan (PU (P1))
		Ruas Jalan Temuireng - Gunungan	Desa Temuireng Kec. Dawarbandong	1.654.022.500	DAU	kelanjutan (Musren Kecamatan)
		Ruas Jalan Segaran - Domas	Desa Temon Kec.	4.669.544.000	DID	P2

			Trowulan			
		Ruas Jalan Suru - Brejel	Desa Suru Kec. Dawarblandong	4.952.720.000	DID	P2
		Ruas Jalan Watesnegoro - Candiharjo	Desa Watesnegoro Kec. Ngoro	3.027.968.000	DID	P2
		Ruas Jalan Pungging - Kedungmunggal	Desa Pungging Kec. Pungging	4.676.582.000	DID	P2
		Ruas Jalan Japanan - Beratkulon	Desa Japanan Kec. Kemlagi	6.001.175.000	DID	P2
		Ruas Jalan Kembangringgit - Randuharjo	Desa Randuharjo Kec. Pungging	3.063.638.000	DID	P2
		Ruas Jalan Dlanggu - Sumberkarang	Desa Sumberkarang Kec. Dlanggu	4.639.943.000	DID	P2
		Ruas Jalan Slepi - Belik	Desa Ketapanrame Kec. Trawas	3.845.787.500	DID	P2
		Ruas Jalan Kertosari - Simbaringin	Desa Simbaringin Kec. Kutorejo	2.721.398.690	DID	P2
		Ruas Jalan Pekingan - Randugenengan	Desa Sumbersono Kec. Dlanggu	4.186.648.190	DID	P2
		Ruas Jalan Sekargadung - Kesemen	Desa Curahmoyo Kec. Pungging	5.342.915.000	DID	P2
		Ruas Jalan Sawahan - Ngembah	Desa Ngembah Kec. Dlanggu	4.691.693.000	DID	P2
		Ruas Jalan Parengan - Lakardowo	Desa Lakardowo Kec. Jetis	4.781.945.000	DID	P2
		Ruas Jalan Centong - Kertosari	Desa Payungrajo Kec. Pungging	5.342.915.000	DID	P2
		Ruas Jalan Balongmojo - Sumbergirang	Desa Sumbergirang Kec. Puri	4.639.943.000	DID	P2

		Ruas Jalan Mojotamping - Sumberpandan	Desa Mojotamping Kec. Bangsal	6.202.875.800	DID	P2
		Ruas Jalan Ngrowo - Salen	Desa Salen Kec. Bangsal	3.959.120.000	DID	P2
		Ruas Jalan Pesanggrahan - Mojorejo	Desa Jiyu Kec. Kutorejo	4.758.554.000	DID	P2
		Ruas Jalan Gumeng - Kemasantani	Desa Kemasan tani Kec. Gondang	3.766.610.000	DID	P2
		Ruas Jalan Mojowiryo - Mojosarirejo	Desa Mojosarirejo Kec. Kemlagi	3.647.841.163	DID	P2
		Ruas Jalan Bening - Karangtuten	Desa Bening Kec. Gondang	5.150.804.510	DID	P2
		Ruas Jalan MoJOROTO - Mojorejo	Desa Mojorejo Kec. Jetis	4.236.241.250	DID	P2
9.1.4	Rekonstruksi Jalan	Ruas Jalan Wonogiri - Lebaksono	Desa Lebaksono Kec. Punggiling	7.830.020.000	DAU	PU (P1)
		Ruas Jalan Nginggasrembyong - Keprabon	Desa Nginggasrembyong Kec. Sooko	2.032.455.760	DAU	(Musren Kecamatan)
		Ruas Jalan Purwojati - Trawas	Desa Kutogiring Kec. Ngoro	9.242.588.000	DAU	(Musren Kecamatan)
		Ruas Jalan Pacet - Trawas	Desa Cembor Kec. Pacet	7.600.684.000	DAU	P1, sudah ditambah dengan penahanan dan program ibu bupati
		Ruas Jalan Karangkedawang - Kedawung	Desa MoJORAN u Kec. Sooko	1.876.156.000	DAU	P1 dan program ibu bupati
		Ruas Jalan Kepuhanyar - Bangsal	Desa Bangsal Kec. Bangsal	4.497.966.875	DAU	Kelanjutan, Penuntasan, jalur alternatif (Musren Kecamatan)

		Ruas Jalan Jatikulon - Jatikulon	Desa Lengkon g Kec. Mojoany ar	1.018.952.440	DID	P2
		Ruas Jalan Kedunglengko ng - Kebonagung	Desa Kedungl engkong Kec. Dlanggu	4.043.110.250	DID	P2
		Ruas Jalan Tegalan - Sidolegi	Desa Gading Kec. Jatirejo	9.206.984.000	DID	P2
			Desa Trowula n Kec. Trowula n		DID	P2
		Ruas Jalan Jasem - Tanggung	Desa Tanggung Kec. Ngoro	10.260.200.000	DID	P2
9.1.5	Rehabilitasi Jalan	Ruas Jalan Kemlagi - Beratkulon	Desa Kutogira ng Kec. Ngoro	3.563.750.000	DAU	PU (P1)
		Ruas Jalan Wringinrejo - Blooto	Desa Wringinrejo Kec. Sooko	906.905.000	DAU	PU (P1)
		Ruas Jalan Sampangagung - Kuripansari	Desa Kuripansari Kec. Pacet	1.225.685.000	DID	P2
		Ruas Jalan Pandanarum - Cembor	Desa Cembor Kec. Pacet	603.660.000	DID	P2
		Ruas Baureno - Sumberjati	Desa Sumberjati Kec. Jatirejo	550.000.000	DID	P2
9.1.6	Pemeliharaan Berkala Jalan	Ruas Jalan Modongan - Wringinrejo	Desa Modongan Kec. Sooko	5.805.560.000	DAU	kelanjutan (PU (P1))
		Ruas Jalan Lebaksono - Slepi	Desa Sukosari Kec. Trawas	7.291.503.650	DAU	jalur utama, akses wisata, kondisi rusak ringan (Musren Kecamatan)

		Pemeliharaan berkalan jalan kompleks SPN		3.164.256.762	DAU	Hibah SPN yaitu a. Jalan Garasi Angkutan Rp. 454.679.270 b. Jalan Asrama Blok B Rp. 463.952.954 c. Jalan Asrama Blok D Rp. 1.701.997.733 d. Jalan Asrama Blok C dan E Rp. 443.387.016 e. Jembatan akses ke TPS Rp. 100.239.789
		Ruas Jalan Pandanarum - Cembor	Desa Bendungan Jati Kec. Pacet	5.652.380.000	DID	P2
		Ruas Jalan Dlanggu - Ketidur	Desa Windurejo Kec. Kutorejo	10.336.714.100	DID	P2
			Desa Dlanggu Kec. Dlanggu			
		Ruas Jalan Pacing - Pacet	Desa Kedunglengkong Kec. Dlanggu	28.939.060.000	DID	P2
			Desa Sumbersono Kec. Dlanggu			
			Desa Sajen Kec. Pacet			
		Ruas Jalan Brangkal - Badung	Desa Puri Kec. Puri	3.191.120.000	DID	P2
		Ruas Jalan Sambiroto - Kweden	Desa Wringinrejo Kec. Sooko	5.133.442.500	DID	P2
		Ruas Jalan	Desa Jaripasar Kec.	3.357.540.006	DID	P2

		Jatipasar - Beloh	Trowulan			
		Ruas Jalan Wringinrejo - Kedungmaling	Desa Kedungmaling Kec. Sooko	4.330.398.880	DID	P2
		Ruas Jalan Klinterejo - Besuk	Desa Klinterejo Kec. Trowulan	1.379.193.440	DID	P2
9.1.7	Pemeliharaan Rutin Jalan	Belanja Pegawai		82.490.000	DAU	PU (P1)
		Belanja Barang		3.138.897.467	DAU	
		Belanja Jasa		2.427.357.440	DAU	
		Belanja Pemeliharaan		14.095.255.094	DAU	
		Belanja Perjalanan Dinas		256.000.000	DAU	
9.1.8	Pembangunan Jembatan	Jembatan Kedung Udi - Ruas Jalan Purwojati - Trawas	Desa Kedungudi Kec. Trawas	2.435.600.000	DAU	kondisi sempit, sering di tabrak pengendara sehingga kondisi rusak, akses wisata dan program ibu bupati
		Jembatan Brugan - Ruas Jalan Purwojati - Trawas	Desa Kedungudi Kec. Trawas	2.435.600.000	DAU	kondisi sempit, sering di tabrak pengendara sehingga kondisi rusak, akses wisata dan program ibu bupati
		Jembatan Purworejo - Ruas Jalan Jatijejer - Tangjungkeno	Desa Jatijejer Kec. Trawas	7.057.677.125	DID	P2
		Jembatan Ponggok - Ruas Jalan Pohjejer - Tumbuk	Desa Wonoploso Kec. Gondang	5.633.750.000	DID	P2
		Jembatan Jrambe I - Dlanggu -	Desa Jrambe	2.352.800.000	DID	P2

		Ruas Jalan Pasinan - Pohkecik	Kec. Dlanggu			
		Jembatan Talunbrak	Desa Talunblandong Kec. Dawarblandong	13.365.200.000	DID	P2
		Jembatan Sumberkembang IV - Ruas Jalan Wonodadi - Jatilangkung	Desa Wonodadi Kec. Kutorejo	4.900.000.000	DID	P2
		Jembatan Kedawung I - Ruas Jalan Tempuran - Bicak	Desa Bicak Kec. Trowulan	20.486.000.000	DID	P2
		Jembatan Cinandang II - Ruas Jalan Simonggagrok - Randegan	Desa Cinandang Kec. Dawarnandong	2.808.200.000	DID	P2
		Jembatan Cinandang I - Ruas Jalan Simonggagrok - Randegan	Desa Cinandang Kec. Dawarnandong	2.482.175.000	DID	P2
9.1.9	Pelebaran Jembatan	Jembatan Bangsri - Ruas Jalan Modopuro - Leminggir	Desa Modopuro Kec. Mojosari	906.775.000	DAU	kondisi sempit, akses utama
9.1.10	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Belanja Pegawai	Kab. Mojokerto	35.655.000	DAU	PU (P1)
		Belanja Barang	Kab. Mojokerto	1.273.609.959	DAU	
		Belanja Jasa	Kab. Mojokerto	15.900.000	DAU	
		Belanja Pemeliharaan	Kab. Mojokerto	397.313.313	DAU	
		Belanja Perjalanan Dinas	Kab. Mojokerto	61.000.000	DAU	
10.1.1	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Kerja Tenaga Terampil Kab. Mojokerto	Kab. Mojokerto	400.000.000	DAU	SKK K3 Minimal 35 Orang

10 .2. 1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Operasional SIPJAKI	Ka b. Mojokerto	100.000.000	DAU	Operasional penginputan Aplikasi SIPJAKI, pendataan kegiatan konstruksi diluar PU
10 .3. 1	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Bimtek Tertib Jasa Konstruksi	Ka b. Mojokerto	280.000.000	DAU	Pembekalan/pelatihan perencanaan, pengawasan konstruksi di desa (10 Desa) (Tindak Lanjut Rekomendasi KPK)
10 .3. 2	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Jasa Konstruksi	Ka b. Mojokerto	100.000.000	DAU	Monitoring pelaksanaan jasa konstruksi
11 .1. 1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Dan Perancangan Perkotaan	Ka b. Mojokerto	951.785.500	DAU	
11 .2. 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		Kab. Mojokerto	150.000.000	DAU	
11 .3. 1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Mojokerto	350.000.000	DAU	
TOTAL				500.006.864.724	DAU/D AK/DI D	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagai dasar penyusunan RKPD, serta dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 dan tahun-tahun yang akan datang.

Apabila dalam dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto akan menjalankan program dan kegiatan dengan memaksimalkan anggaran yang ada.

Segala sesuatu yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas yang telah diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

----- o0o -----

Mojokerto, 13 Juli 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO



Ir. RINALDI RIZAL SABIRIN, ST., MBA.

Pembina Tk. I

NIP. 19791010 200901 1 011